



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK REKLAME DI KOTA PADANG

SKRIPSI



ANDI MARTA PUTRA

05 153 058

**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

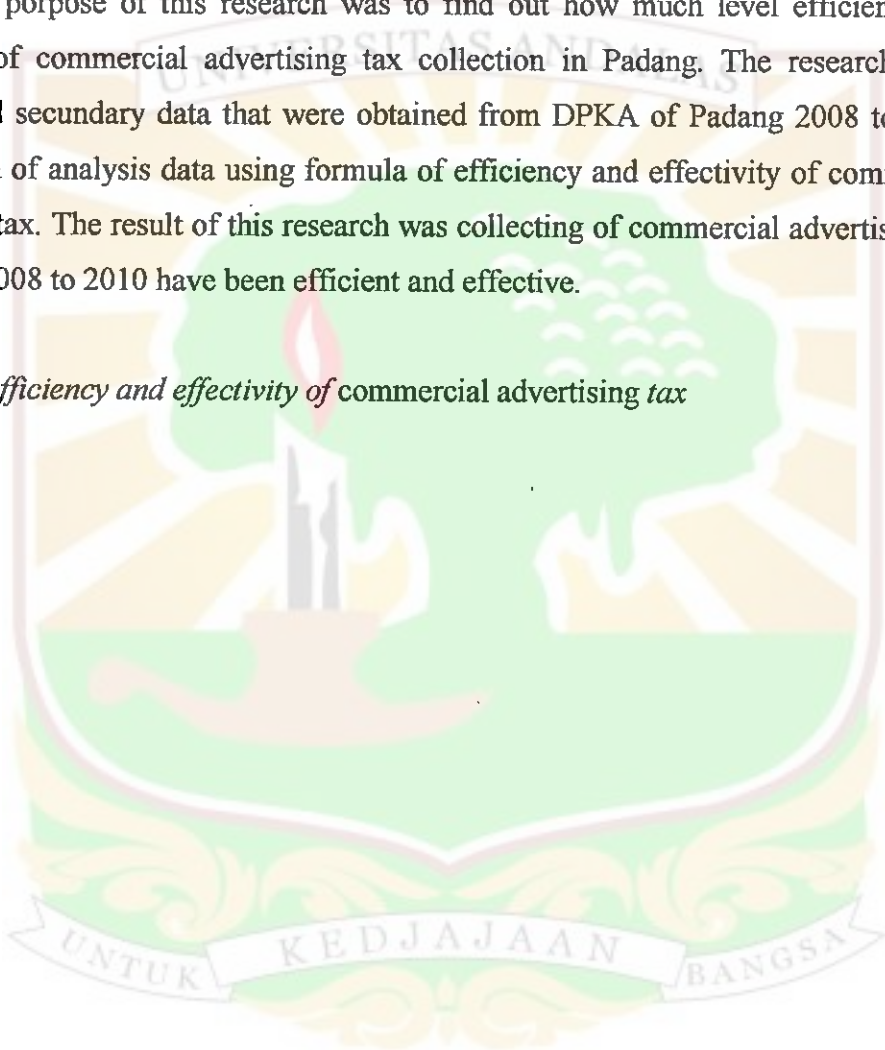
ABSTRACT

Mini Script with title “The Efficiency and Effectivity Analysis of commercial advertising Tax Collection in Padang”

by Andi Marta Putra. Leader : Drs. Suhanda, M. Si. Ak

The purpose of this research was to find out how much level efficiency and effectivity of commercial advertising tax collection in Padang. The research using primary and secondary data that were obtained from DPKA of Padang 2008 to 2010. The method of analysis data using formula of efficiency and effectivity of commercial advertising tax. The result of this research was collecting of commercial advertising tax in Padang 2008 to 2010 have been efficient and effective.

Keyword : efficiency and effectivity of commercial advertising tax



ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Padang”

oleh Andi Marta Putra. Pembimbing : Drs. Suhandi, M. Si. Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak reklame di kota Padang. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari DPKA kota Padang antara tahun 2008 sampai tahun 2010. Metode analisis data menggunakan perhitungan rumus efisiensi dan efektifitas pajak reklame. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemungutan pajak reklame di kota Padang tahun 2008-2010 sudah efisien dan efektif.

Kata Kunci : efisiensi dan efektifitas pajak reklame



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam skripsi ini disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, Mei 2012

Andi Marta Putra
05 153 058



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya yang telah menjadi energi terbesar yang memberikan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul *Analisis Efisiensi dan Evektifitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Padang*. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah bagi Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan terbaik dalam semua sisi kehidupan yang diingini oleh seseorang yang mencari sosok teladan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

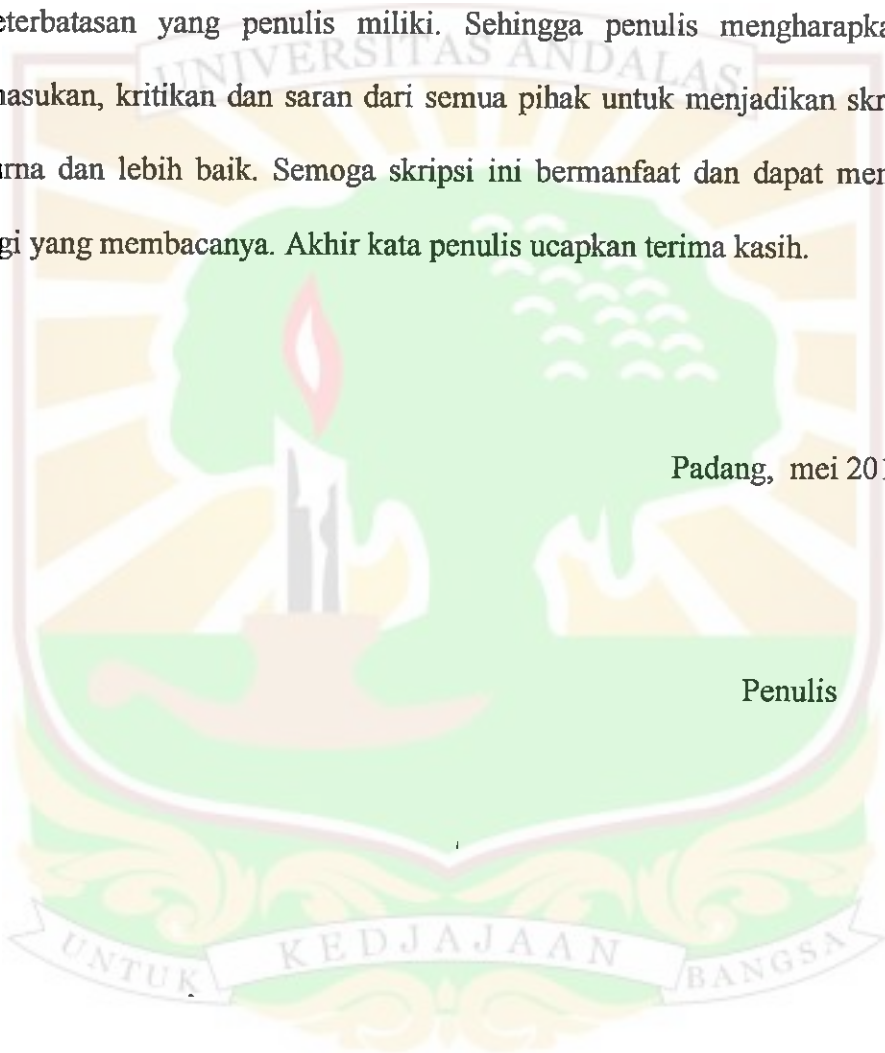
1. Kedua orang tua serta keluarga besar penulis atas doa, kasih sayang dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta studi di Jurusan Akuntansi Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. H. Syafruddin Karimi, SE., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. H. Yuskar, SE., MA., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Fauzan Misra, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Reguler S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Drs. Suhandi, M. Si. Ak yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan pengetahuan dan arahan untuk penulis sehingga sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dra. Warnida. MM, Ak yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama studi di Jurusan Akuntansi Universitas Andalas ini.

Selanjutnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/staf pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi, karyawan-karyawati Jurusan Akuntansi (Mama Lolli, Bang Ari dan Uni Eva).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Sehingga penulis mengharapkan dan menerima masukan, kritikan dan saran dari semua pihak untuk menjadikan skripsi ini lebih sempurna dan lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, mei 2012

Penulis

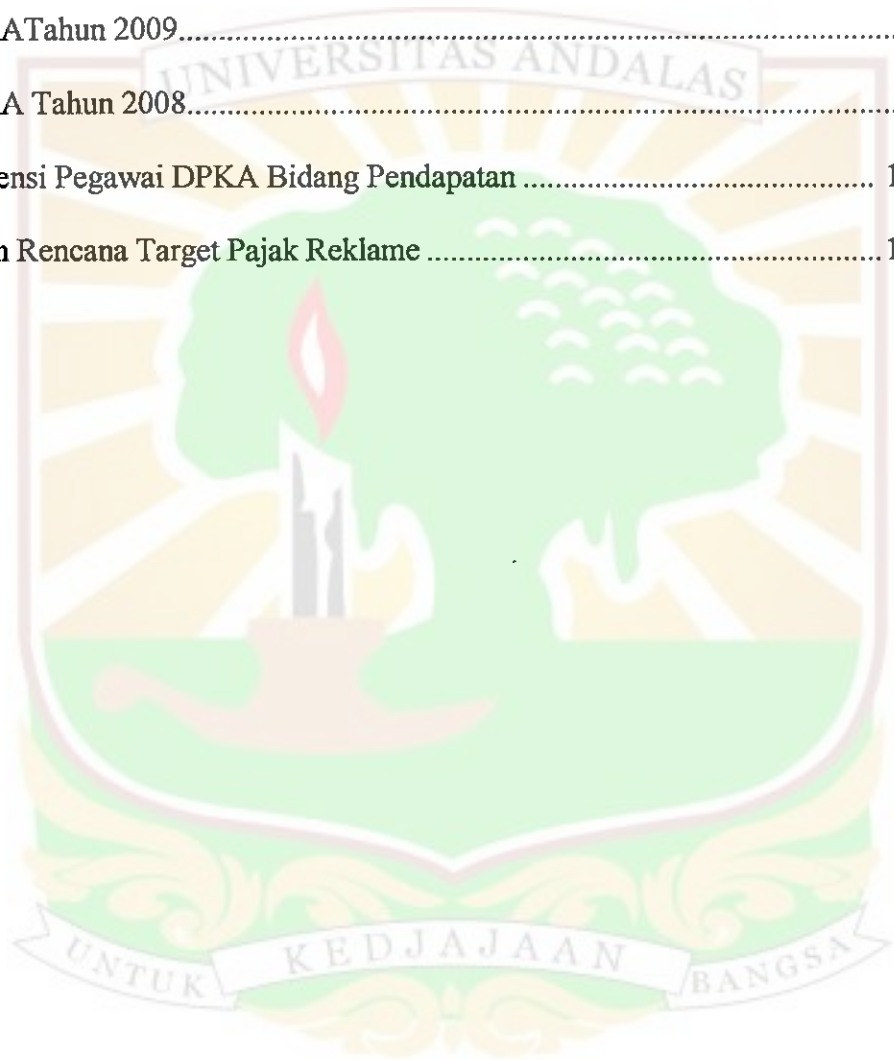


DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Pajak	14
2.2. Pajak Reklame.....	12
2.3. Efisiensi dan Efektifitas.....	30
2.4. Potensi Penerimaan Pajak dan Target Penerimaan Pajak	33
2.5. Klasifikasi Belanja	35
2.6. Review Penelitian Terdahulu	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Variabel Penelitian	43

3.3. Jenis dan Sumber Data	43
3.4. Metode Pengumpulan Data	44
3.5. Metode Analisis Data	44
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	49
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	52
4.3. Gambaran Umum Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang	52
4.4. Susunan Organisasi DPKA Kota Padang	53
4.5. Operasional Pemungutan Pajak Reklame.....	60
4.6. Penyelenggaraan Pajak Reklame.....	61
4.7. Pendapata Regional	62
4.8. Mekanisme Izin Penyelenggaraan Reklame.....	63
4.9. Tata Cara Pemasangan Reklame	66
4.10. Objek Pajak Reklame dan Tarif Pajak Reklame	67
4.11. Analisis Efektifitas Pajak Reklame	71
4.12. Analisa Target Pajak Reklame Kota Padang.....	73
4.13. Analisis Efisiensi Pajak Reklame.....	75
4.14. Faktor Penghambat Yang Dihadapi DPKA Kota Padang.....	80
4.15. Solusi Yang Ditempuh DPKA	81
BAB V PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran.....	82
5.3. Keterbatasan Penelitian	83

DAFTAR PUSTAKA	xi
LAMPIRAN	85
Rekomendasi Penelitian	85
Biaya DPKA Tahun 2010.....	86
Biaya DPKA Tahun 2009.....	92
Biaya DPKA Tahun 2008.....	99
Daftar Absensi Pegawai DPKA Bidang Pendapatan	102
Perhitungan Rencana Target Pajak Reklame	105



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Perjenis Pendapatan Kota Padang	3
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang	6
Tabel 3.1 Klasifikasi Biaya Berdasarkan PP 24 Th 2005 dan Permendagri 59/2007	45
Tabel 4.1 Komposisi Pendidikan Pegawai Bidang Pendapatan DPKA Kota Padang	59
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dan Pangkat Bidang Pendapatan	60
Tabel 4.3 Daftar Nama Perusahaan Yang Dikirim Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Sewa Tanah Dan Reklame	61
Tabel 4.4 PDRB Kota Padang Tahun 2008 – 2010	63
Tabel 4.5 Tarif Pajak Reklame Kota Padang	70
Tabel 4.6 Efektifitas Pajak Reklame Kota Padang	72
Tabel 4.7 Dasar Alokasi Biaya Pajak	76
Tabel 4.8 Biaya Insentif Atas Realisasi Pajak Reklame	76
Tabel 4.9 Perhitungan Biaya Pajak Reklame tahun 2008	77
Tabel 4.10 Perhitungan Biaya Pajak Reklame tahun 2009	78
Tabel 4.11 Perhitungan Biaya Pajak Reklame tahun 2010	79
Tabel 4.12 Perhitungan Efisiensi Pajak Reklame	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara kita. Hal ini dapat kita lihat pada susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap tahunnya sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan utama. Dikarenakan sektor pajak merupakan lini vital yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pendapatan Negara dan pertumbuhan pembangunan, maka sewajarnya pajak mendapat perhatian yang sangat serius dan sungguh-sungguh.

Untuk itu pemerintah berusaha untuk melakukan berbagai usaha agar penerimaan Negara dari sektor pajak ini tidak terjadi kebocoran demi pengamanan keuangan Negara. Dalam menyelenggarakan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri faktor sumber pendapatan daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan di daerah.

Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah secara merata, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah, yang pelaksanaan diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik.

Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak dan retribusi,

meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain.

Upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara peningkatan pajak daerah. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan. Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya.

Sumber-sumber PAD kota Padang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah. Masing-masing PAD Kota Padang, disajikan dalam table 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Per Jenis Pendapatan Kota Padang Tahun 2008-2010

Jenis Pendapatan	2008	2009	2010
Pajak Daerah	76.795.691.361	71.666.752.249	96.840.000.000

Retribusi Daerah	24.811.993.119	21.898.304.849	38.889.135.140
Bagian Laba Perusahaan Daerah	3.788.864.957	4.741.733.453	5.250.780.000
Lain-lain PAD yang sah	12.469.729.733	14.961.863.631	12143258683
Jumlah	117.866.279.170	113.268.654.182	140,979,915,140

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Padang Tahun 2008-2010

Dari table 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pajak daerah menduduki urutan pertama dalam hal kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu sumbangan pajak daerah cukup berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kondisi perekonomian yang baik juga turut serta dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kota Padang adalah pajak daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dengan diterbitkan nya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini, terdapat 16 jenis pajak daerah yang dibagi kedalam dua pihak pemungut pajak yaitu:

1. Pajak Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, terdiri atas:

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan;
- e) Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum dipungut oleh pemerintah pusat (disebut pajak pusat), sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Adapun kriteria dari pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Bersifat pajak, dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya

melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.
6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
7. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Kontribusi dari masing-masing Pajak Daerah di Kota Padang, dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2008-2010.

Jenis Pajak Daerah	2008	2009	2010
Pajak Hotel	7.582.483.951	6.948.371.260	6.106.355.228
Pajak Restoran	8.247.380.757	7.596.772.297	6.992.766.148
Pajak Hiburan	507.731.475	619.875.293	718.116.425
Pajak Reklame	4.171.560.886	3.423.898.310	3.020.545.000
Pajak Penerangan Jalan	29.917.524.400	30.588.560.470	38.577.494.675
Pajak Galian C	22.966.916.736.	18.405.971.848	22.235.642.880
Pajak Parkir	120.001.703	102.654.680	58.420.200
Jumlah	76.795.691.361	71.666.752.249	77.639.340.556

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Padang Tahun 2008-2010

Dari table di atas terdapat satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh Pemerintah Padang, yaitu pajak reklame. Walaupun jumlah penerimaan pajak reklame selalu meningkat namun rata-rata kontribusi pajak reklame selama enam tahun terakhir hanya sebesar 4,4 %.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejauh mana upaya DPKA kota Padang dalam memungut pajak Reklame. Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini **“Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Padang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Seberapa besar efisiensi pemungutan pajak reklame di kota Padang ?
- Seberapa besar efektifitas pemungutan pajak reklame di kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pajak reklame di kota Padang.
- Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas pajak reklame di kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

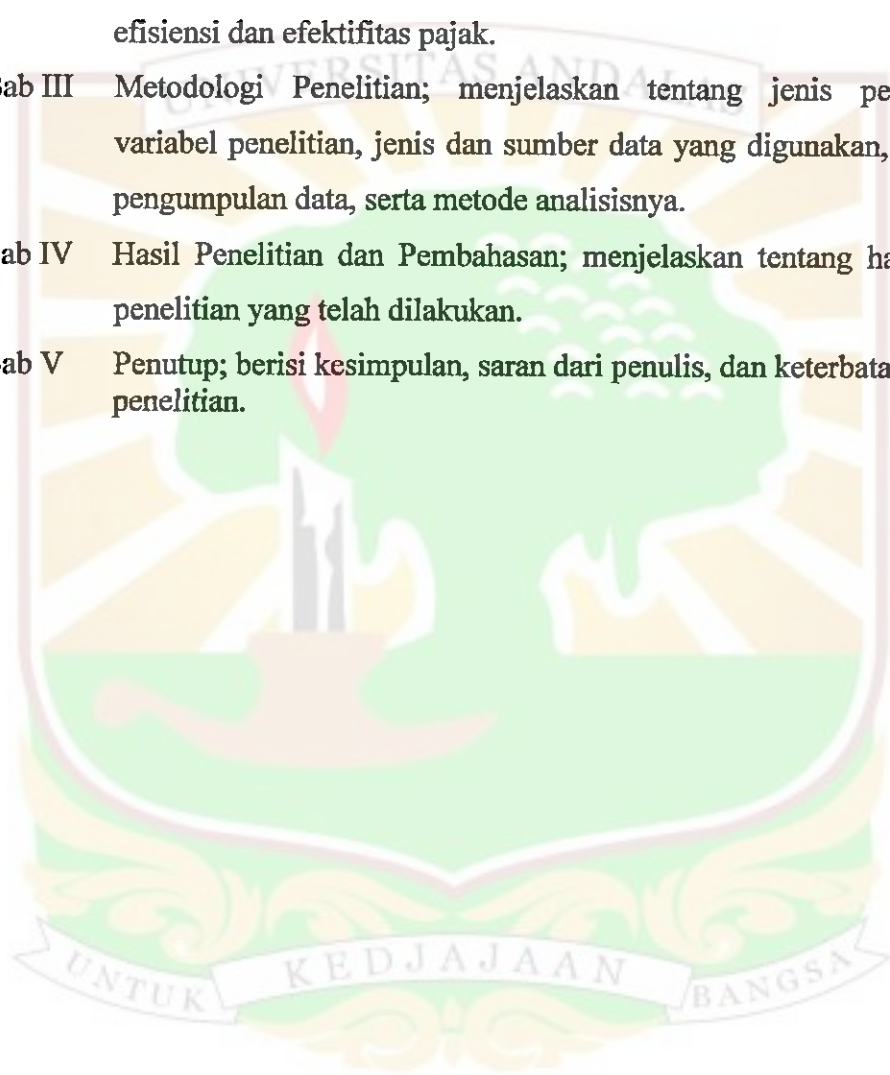
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menambah wawasan keilmuan mahasiswa tentang pajak reklame.
- Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerahnya.
- Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Landasan Teori; menjelaskan tentang pajak, pajak reklame, serta efisiensi dan efektifitas pajak.
- Bab III Metodologi Penelitian; menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
- Bab V Penutup; berisi kesimpulan, saran dari penulis, dan keterbatasan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :

- Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada pembayar pajak.
- Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundangan pajak dikenakan pajak.

- Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. PBB Perdesaan dan Perkotaan
- i. BPHTB
- j. Pajak Sarang Burung Walet

Adapun maksud pengertian dari masing-masing pajak tersebut menurut penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2) Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

3) Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga

4) Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah.

5) Pajak penerangan jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6) Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C

Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C, sedangkan obyek pajak ini adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Besarnya tarif pajak ini ditetapkan sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

7) Pajak Parkir

Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

8) PBB Perdesaan dan Perkotaan

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat.

9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Maka dari itu BPHTB di alihkan menjadi Pajak Daerah.

10) Pajak Sarang Burung Walet

Merupakan jenis pajak daerah yang baru dipungut. Ini dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di daerahnya.

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti dengan pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, namun jika tidak, masyarakat kurang menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah

seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

2.2 Pajak Reklame

a. Pengertian

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Dasar hukum pemungutan pajak reklame kota Padang

- Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No 34 tahun 2000 dan Undang-Undang No 18 tahun 1997 Tentang Pajak Reklame dan Retribusi daerah.
- Perda no 8 tahun 2011
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

c. Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame di sini adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah :

- **Reklame Papan/Billboard**
Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
- **Reklame videotron/ megatron / *Large Electronic Display (LED)***
Reklame megatron adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan

berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

- **Reklame kain**

Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

- **Reklame Melekat (Stiker)**

Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.

- **Reklame Selebaran**

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain.

- **Reklame Berjalan / Kendaraan**

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

- **Reklame Udara**

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

- **Reklame Suara**

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

- **Reklame Film atau Slide**

Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

- **Reklame Peragaan**

Reklame peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

- d. Bukan objek pajak reklame**

- Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, dan warta bulanan.
- Penyelenggaraan reklame seperti bendera organisasi masyarakat, organisasi politik, dan spanduk social lainnya.

- e. Subjek pajak dan Wajib pajak reklame**

Pada pajak reklame, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame langsung diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga inilah yang menjadi wajib pajak reklame.

- f. Dasar Pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak reklame**

- **Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. NSR diperhitungkan dengan memerhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame. NSR dihitung berdasarkan :

- Besarnya biaya pemasangan reklame,
- Besarnya biaya pemeliharaan reklame,
- Lama pemasangan reklame,
- Nilai strategis lokasi,
- Jenis reklame

Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan perda. Umumnya perda akan menetapkan NSR yang ditetapkan oleh bupati / walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten / kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati / walikota. NSR dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame}$$

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya. Sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggara reklame, yang meliputi indikator :

- Biaya pembuatan / konstruksi
- Biaya pemeliharaan
- Lama pemasangan
- Jenis reklame
- Luas bidang reklame
- Ketinggian Reklame

Besarnya NJOR dihitung dengan rumus :

$$NJOR = (\text{ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran reklame, dengan indikator : Nilai Fungsi Ruang (NFR) lokasi pemasangan : Nilai Fungsi Jalan (NFJ) : dan Nilai Sudut Pandang (NSP). Besarnya NSPR dihitung dengan rumus :

$$NSPR = (NFR + NSP + NFJ) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$

$$NSPR = [\{ \text{Fungsi Ruang (= Bobot x Skor)} \} + \text{Fungsi Jalan (= Bobot x skor)} \} + \{ \text{Sudut Pandang (= Bobot x Skor)} \}] \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar di mana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
- Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi.
- Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.
- Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % dan ditetapkan dengan perda kab/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemkab.pemkot untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten / kota.

- Perhitungan Pajak Reklame

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$

g. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Pada pajak reklame, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu yang lain ditetapkan dengan keputusan walikota / bupati. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Umumnya masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan perda kab / kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat penyelenggaraan reklame.

Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah kab / kota tempat reklame berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kota / kab yang hanya terbatas atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

h. Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan

- **Pengukuhan Wajib Pajak**

Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati / walikota, dalam prakteknya melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset kab / kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota dimana pajak reklame dipungut.

Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset tidak merupakan dasar untuk menentukan saat terutang Pajak Reklame, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPKA).

- **Pendaftaran dan Pendataan**

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan ini diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam

Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

i. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Reklame wajib melaporkan kepada DPKA, tentang penghitungan dan pembayaran pajak reklame yang terutang. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun, dicatat dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

Bupati / walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam perda. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan perda.

j. Penetapan Pajak Reklame

- Cara Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan,

pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Kegiatan pajak yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

- **Penetapan Pajak Reklame**

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas DPKA, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan Pajak Reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- **Ketetapan Pajak**

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemetiksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

- **Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)**

Bupati/walikota dapat menerbitkan STPD jika pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat dari salah tulis dan atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang. Sedangkan sanksi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD.

Selain itu, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD jika kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota masing-masing daerah.

k. Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame

- **Pembayaran Pajak Reklame**

Pajak reklame terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perda, misal selambat-lambatnya 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak reklame ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Reklame harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran Pajak Reklame yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Sehingga pembayaran pajak mudah terpantau oleh petugas DPKA.

- **Penagihan Pajak Reklame**

Apabila pajak reklame yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

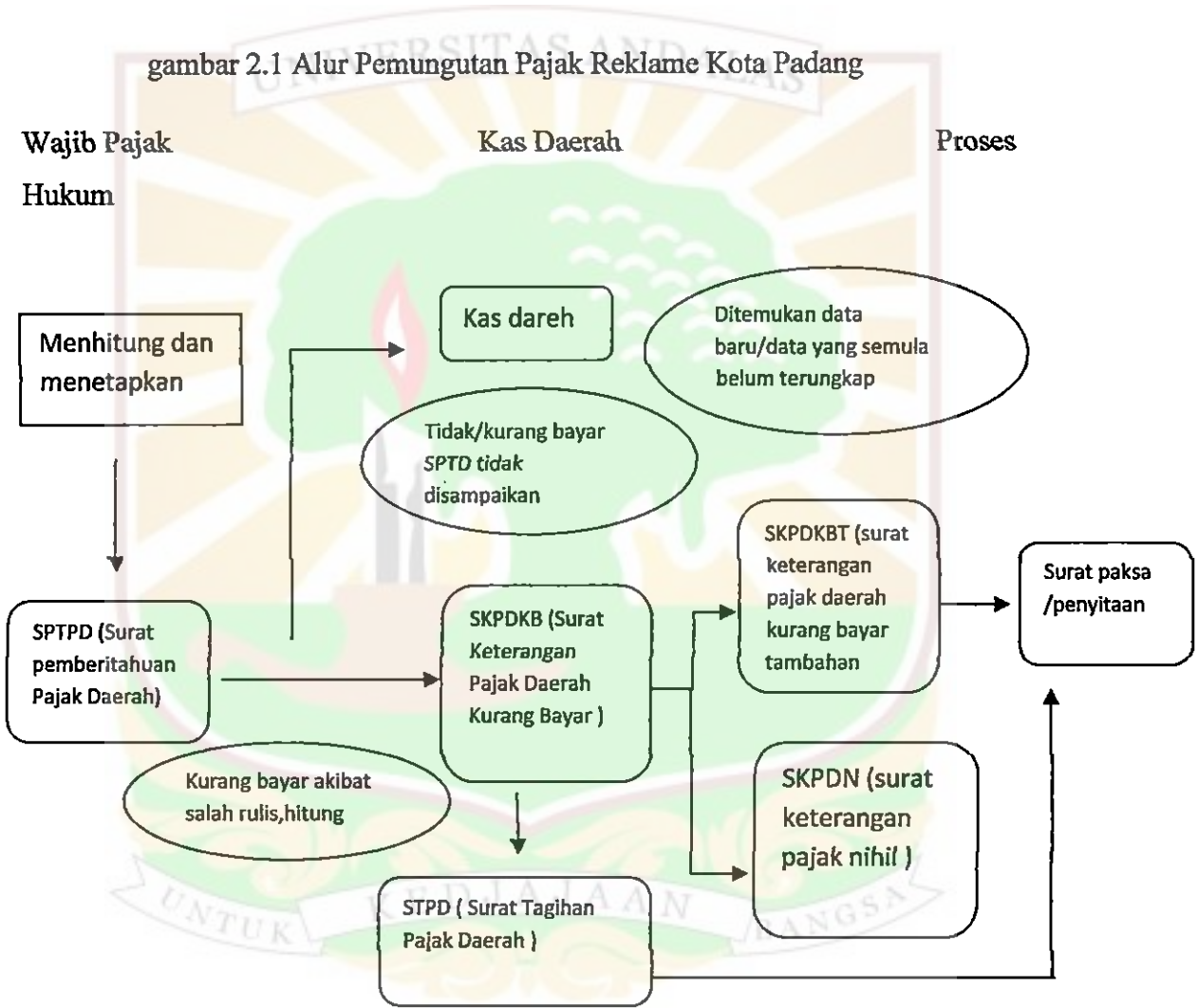
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran maka wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

Bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenisnya akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, Pemkab/pemkot diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak.

Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur

lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak reklame yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus.



1. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Bupati/walikota, karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

- Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan wajib pajak dalam hal penetapan pajak oleh kepala daerah akibat adanya kesalahan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

m. Keberatan dan Banding

- Keberatan

Wajib Pajak Reklame yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh bupati/walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati/walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perda Pajak Reklame dimaksud.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak reklame dan pelaksanaan penagihan pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu bupati/walikota akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan tersebut. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan

atas keberatan yang diajukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi.

Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

- **Banding**

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam hal demikian wajib pajak diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya.

Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran (jika ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu 24 bulan.

n. Pemeriksaan Pajak Reklame

Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan perda tentang pajak reklame. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati/walikota atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenalan pemeriksa dan surat

perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.

o. Keringanan dan Pembebasan Pajak Reklame

Berdasarkan permohonan wajib pajak, bupati/walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Reklame. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

p. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame

Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran pajak reklame, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak, tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya permohonan keberatan atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, ataupun sebab lainnya. Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati/walikota.

Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jika dalam jangka waktu tersebut, kepala daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.

Jika wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu dua bulan sejak diterbitkan SKPDLB, jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu paling lama dua bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada kepala daerah dengan menyebutkan :

- Nama dan alamat wajib pajak

- Masa pajak
- Besarnya kelebihan pembayaran pajak
- Alasan yang jelas

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos, dan bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos merupakan bukti saat permohonan tersebut diterima oleh Kepala Daerah.

q. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Reklame

- Bagi Hasil Pajak Reklame

Hasil penerimaan pajak reklame merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagai diperuntukkan bagi desa di wilayah kabupaten tempat pemungutan pajak reklame. Hasil penerimaan Pajak Reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antar desa.

- Biaya Pemungutan Pajak Reklame

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak reklame, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Allokasi biaya pemungutan Pajak Reklame ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

r. Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame

- Kadaluwarsa Penagihan Pajak Reklame

Hak bupati/walikota untuk melakukan penagihan Pajak Reklame kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Namun, dalam keadaan tertentu kadaluwarsa penagihan pajak

reklame dapat ditanggguhkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran, atau surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- **Penghapusan Piutang Pajak Reklame**

Piutang Pajak Reklame yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala DPKA. Berdasarkan permohonan tersebut walikota/bupati menetapkan penghapusan piutang pajak reklame dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh bupati/walikota.

s. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak Reklame

- **Kewajiban Pejabat**

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota untuk mengelola pajak reklame dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain untuk petugas pajak, ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian akan hak wajib pajak bahwa setiap keterangan dan dokumen disampaikan kepada Kepala Daerah atau petugas pajak yang ditunjuk hanya untuk kepentingan pengenaan dan pemungutan pajak reklame.

- **Ketentuan Pidana**

Wajib pajak reklame yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana engan pidana kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Sanksi pidana kurungan atau penjara dan atau denda juga dikenakan terhadap pejabat yang karena kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar.

- **Penyidikan Pajak Reklame**

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Reklame, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Reklame dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

t. Pembatalan dan Pencabutan Izin

- Izin dibatalkan apabila :
 - Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat / Daerah karena perubahan tata ruang dan rencana kota
 - Penyelenggara reklame melanggar ketentuan yang telah ditetapkan / diatur tentang penyelenggara reklame.
 - Keinginan sendiri dari penyelenggara reklame.
- Izin dicabut apabila :
 - Pada reklame tersebut terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan teks, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan.
 - Menurut pertimbangan walikota Padang ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan dan keamanan.
 - Penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat.
 - Penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Terhadap pembatalan izin dan pencabutan izin reklame, maka pajak reklame dan retribusi sewa tanah yang telah dibayarkan tidak dapat dimintakan kompensasinya atau pengembalian pajak dan retribusi dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.

u. Pengawasan dan Penertiban Reklame

Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh DPKA dan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkoordinasi. Pengawasan meliputi penyelenggaraan reklame baru dan penyelenggaraan reklame perpanjangan (lama)

Jika dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame, kepala DPKA dapat melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas Dinas Luar atau Petugas Operasional berdasarkan surat tugas pemeriksaan yang diterbitkan oleh kepala DPKA. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, kepala DPKA melalui Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan dapat menetapkan besarnya pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan atau kenaikan dan atau tambahan.

Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :

- a) Pembayaran pajak dan retribusi kurang dari yang seharusnya dibayar.
- b) Tidak memiliki izin dari pemerintah Kota Padang
- c) Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang
- d) Terdapat perubahan, sehingga tidak lagi sesuai dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi :
 - 1) Perubahan teks/isi reklame
 - 2) Perubahan ukuran reklame
 - 3) Perubahan bentuk reklame
- e) Peletakan titik reklame tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar yang disetujui

Dalam hal penertiban reklame terpasang dalam bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan atau sarana dan petugas, maka kepala DPKA dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan

pembongkaran reklame dimaksud. Penertiban reklame terpasang dapat dipaksakan tanpa harus mengeluarkan surat peringatan terlebih dahulu.

2.3 Efisiensi dan Efektifitas Pajak

a. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input (cost of output) (Mahmudi: 2007). Penyimpangan terhadap kehematan dan efisiensi terjadi bila suatu produk tidak dicapai dengan menggunakan sumber dana yang serendah-rendah nya (spending well). Saat penggunaan sumberdaya melebihi batas normal saat itu dapat dikatakan telah terjadi pemborosan. dalam alokasi belanja tertentu hal ini dapat dikategorikan sebagai mark-up terhadap harga (Ahmadi:2005).

Berkaitan dengan pajak, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara biaya pemungutan pajak dengan realisasi pajak. Biaya pemungutan yang dimaksud disini adalah biaya kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya, sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai. Efisiensi semakin besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan dari sektor pajak ditekan serendah mungkin dengan hasil yang akan diperoleh dari pajak tersebut (Devas: 1989), atau bisa juga dikatakan efisien apabila perbandingan biaya dengan realisasi yang telah dicapai nilainya semakin kecil. Penerimaan pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Semakin kecil rasio maka semakin efisien (Medi: 1996)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- 1) Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input-output).
- 2) Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
- 3) Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor – Faktor Penentu Efisien adalah :

- 1) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- 3) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- 4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat.
- 5) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Rumus pengukuran efisiensi untuk pemungutan pajak:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu :

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.

3. Apabila hasilnya $>85\%$ berarti tidak efisien.

Penerimaan Pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin efisien (medi, 1996).

Biaya Pemungutan Pajak :

- a) Biaya Pendaftaran
- b) Biaya Pendataan
- c) Biaya Penetapan Besarnya Pajak Terutang
- d) Biaya Penagihan

Sedangkan berdasarkan jenis belanja yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang dibedakan kedalam :

- 1. Belanja Tidak Langsung
 - a) Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS
- 2. Belanja Langsung
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 - c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
 - d) Program Peningkatan dan Penigkatan Peengelolaan Keuangan Daerah

b. Efektifitas

Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Devas: 1989).

Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Sally:2007).

Efektifitas berfokus pada outcome (tujuan/target yang ditetapkan). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi: 2007)

Rumus pengukuran efektifitas untuk pemungutan pajak:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektifitas diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal keberhasilan rasio adalah 100% atau 1 dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Koefisien efektifitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif.

2.4 Potensi Penerimaan Pajak dan Target Penerimaan Pajak

a. Potensi Penerimaan Pajak

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh (mahmudi : 2009).Karna potensi masih tersembunyi, maka perlu diteliti besar potensi pendapatan yang ada.Bagi manajer publik,kemampuan mengenali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal merupakan kapasitas interpreneurship mereka dalam mengelola organisasi sektor publik.

Potensi pendapatan suatu daerah dengan daerah lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi

Potensi Pajak adalah: potensi yang diukur dengan cara pengkalian data hasil observasi obyek pajak dengan tarif Pajak sehingga ditemukan estimasi jumlah pajak terutang yang ditanggung oleh WajibPajak tersebut.

b. Target Penerimaan Pajak

Target adalah kriteria umum yang dipakai sebagai ukuran kinerja yaitu

kualitas, kuantitas, dan waktu yang dipakai, jabatan yang dipegang, absensi dalam menjalankan pekerjaan (Iqbal:2004). Target adalah faktor kinerja pegawai dalam efektivitas pengelolaan pendapatan Negara merupakan hasil kerja aparat pelaksana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui tugas, karena berhasil tidaknya penerimaan/pendapatan dari sumber-sumber yang dikelola oleh negara sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas kerja aparaturinya dalam mencapai hasil yang diharapkan melalui organisasi (Sally:2007).

Target dengan melihat kemampuan administrator dalam suatu organisasi menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Mungkin kemampuan itu dimanfaatkan atau tidak. Kemampuan menunjukkan kepada apakah “seseorang dapat melakukan sesuatu bukan apa”. Kemampuan berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan pekerjaan yang ingin dilakukannya. Potensi yang berkemampuan tinggi akan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang terbatas dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang setinggi-tingginya, dan sebaliknya apabila kemampuan rendah maka kemampuan untuk membuat sarana dan prasarana lengkap menjadi mibazir atau paling tidak kurang dimanfaatkan secara sepenuhnya.

Sedangkan factor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian target pajak adalah suku bunga, inflasi, ekspor, impor, dan kurs valuta asing. Selanjutnya dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara yang memperhatikan keseimbangan internal dan eksternalnya. Keseimbangan internal merujuk pada tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh dengan stabilitas harga. Keseimbangan internal dapat dicapai melalui kebijakan fiskal dan moneter terhadap pengangguran dan inflasi. Keseimbangan eksternal merujuk pada keseimbangan dalam neraca pembayaran negara itu dengan kebijaksanaan restriksi dan ekspansi.

2.5 Klasifikasi Belanja

Perencanaan dan pengendalian belanja merupakan aktivitas penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, sebab belanja yang tidak terencana dan terkendali dengan baik akan menjadi sumber inefisiensi dan pemborosan uang

negara yang sangat merugikan masyarakat. Agar pemerintah dapat mengelola belanja yaitu memenuhi prinsip Value for Money maka penting untuk mengetahui pemahaman tentang konsep belanja.

a) Pengertian Biaya, Belanja, Pengeluaran

- **Pengertian Biaya**

Biaya didefinisikan sebagai; Pengorbanan sumber daya ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dimasa sekarang dan yang akan datang (mahmudi: 2009)

Manajer keuangan publik perlu memahami konsep biaya karena beberapa alasan:

1. Beberapa organisasi sektor publik tertentu menghasilkan barang atau jasa pelayanan publik yang bisa dijual misalnya pelayanan pengumpulan dan pengolahan sampah, penyediaan jalan tol, penyediaan air minum dan sebagai nya. Untuk itu kemampuan menghitung biaya produksi pelayanan secara tepat sangat penting dalam rangka pembuatan kebijakan tentang penentuan harga pelayanan yang akan dibebankan kepada pengguna pelayanan.
2. Biaya dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi.
3. Penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance based bugeting) membutuhkan serangkaian indikator kinerja dan target kinerja, indikator kinerja tersebut meliputi indikator input, output dan outcome.
4. Informasi biaya sangat penting dalam membuat keputusan tender, outsourcing, atau privatisasi.

- **Pengertian Belanja**

Belanja dalam sektor publik terkait dengan penggaran yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran (mahmudi ; 2009) .

- **Pengertian Pengeluaran**

Pengeluaran merupakan komponen pos pembiayaan dalam struktur APBD yang dimaksud untuk memanfaatkan surplus anggaran yang berlebih (mahmudi: 2009).

b) Konsep Biaya Atau Belanja

- **Objek Biaya**

Objek Biaya adalah Segala sesuatu yang menjadi tujuan pembebanan biaya. objek biaya bisa berupa produk barang atau jasa, program, kegiatan, fungsi, unit kerja, atau organisasi secara keseluruhan. pemahaman mengenai objek biaya penting untuk pembebanan dari biaya dan siapa yang akan menanggung biaya tersebut, hal ini sesuai dengan konsep *different cost for different purposes*, yaitu setiap biaya yang dikeluarkan harus memiliki tujuan dan tujuan ini yang menjadi dasar penentuan objek biaya.

Jika dilihat dari objek biaya biaya diklasifikasikan menjadi dua :

- a. **Biaya langsung (direct cost)**

biaya langsung memiliki hubungan yang jelas dengan objek biaya, sehingga dapat dihitung secara lebih akurat, biaya langsung ini dapat dirunut ke objek biaya dengan mudah berdasarkan hubungan sebab akibat.

- b. **Biaya tidak langsung.**

Biaya yang tidak memiliki kaitan langsung dengan objek biaya

- **Perunutan Biaya**

Perunutan biaya adalah upaya untuk mengetahui asal muasal biaya dan mengapa biaya tersebut terjadi.

Perunutan biaya dapat dilakukan dari dua pendekatan :

- 1. **pelacakan langsung (direct tracing)**

Pelacakan langsung adalah : proses identifikasi dan pembebanan biaya yang memiliki hubungan dengan objek biaya secara eksklusif

- 2. **pelacakan pemacu biaya.**

Perunutan melalui pemacu biaya dilakukan dengan mencari variabel yang menjadi pemacu biaya (*driver cost*). Pemacu biaya menunjukkan variabel yang menyebabkan suatu biaya bertambah atau berkurang. pemacu biaya bisa berupa jumlah jam kerja, jumlah pegawai, jumlah kegiatan dan sebagainya.

- **Alokasi Biaya**

Pembebanan biaya kepada objek biaya dilakukan melalui dua tahap, yaitu: 1) pembebanan biaya langsung ke objek biaya 2) Mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung ke objek Biaya Alokasi biaya adalah upaya untuk membagi biaya (cost shering) diantara berbagai produk, program, fungsi, dan organisasi karena telah mengkonsumsi biaya secara bersama-sama. Alokasi biaya ini umumnya dilakukan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung (overhead)

- **Akumulasi Biaya**

Akumulasi biaya adalah penjumlahan seluruh biaya sehingga menghasilkan informasi tentang seluruh biaya yang dikonsumsi oleh suatu produk, program, kegiatan, fungsi, atau organisasi. Akumulasi biaya meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung ke objek biaya.

c) Klasifikasi Biaya atau Belanja

- **Klasifikasi biaya berdasarkan berdasarkan waktu terjadinya**

Berdasarkan waktu terjadinya maka biaya dapat diklasifikasikan menjadi tiga :

1. **Biaya Historis**

Yaitu biaya yang sudah terjadi dimasa lampau yang sudah dibukukan dalam sistem akuntansi. biaya historis ini tidak berubah dan akan selalu tetap jumlahnya selama tidak dilakukan revaluasi.

2. **Biaya Sekarang**

Sering juga diistilahkan dengan biaya pengganti, yaitu biaya yang terjadi padasaat sekarang yang diukur berdasarkan nilai pasar sekarang jika nilai pasar tidak diketahui maka diukur berdasarkan biaya penggantinya

3. **Biaya Dianggarkan**

Biaya yang direncanakan terjadi pada masa yang akan datang, biaya dianggarkan ini merupakan biaya yang dinyatakan

dalam anggaran

- Klasifikasi biaya berdasarkan reaksinya terhadap perubahan tingkat aktifitas

1. Biaya Tetap (fixed cost)

Adalah :Biaya yang jumlahnya tetap tidak terpengaruh dengan tingkat aktivitas.

Biaya tetap mempunyai sifat

- Jumlah totalnya tidak berubah walaupun kegiatan berubah
- Biaya per unit semakin kecil apabila volume kegiatan semakin besar

Padasarnya biaya tetap tidak berubah jumlahnya dalam jangka waktu tertentu, namun dalam jangka panjang biaya akan berubah. Biaya tetap akan tetap jumlahnya pada tingkat kapasitas tertentu apabila kegiatan melebihi kapasitas maka biaya tetap akan berubah jumlahnya.

2. Biaya Variabel (Variable cost)

Adalah : Biaya yang per unitnya tetap tidak dipengaruhi oleh perubahan kegiatan perubahan kegiatan operasional, tetapi jumlah totalnya bervariasi atau berubah-ubah secara proporsional dengan volume kegiatan.

3. Biaya campuran (Mixed cost)

Biaya jenis ini tidak murni biaya tetap dan tidak murni biaya Variabel.

- Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan aktifitas

1. Biaya langsung, yaitu biaya yang langsung terkait dengan kegiatan. Artinya suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa biaya tersebut. Biaya langsung meliputi :

- Biaya tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja (personil) yang terlibat langsung dengan pelaksana kegiatan.
- Biaya barang dan jasa, yaitu biaya – biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang dan jasa digunakan untuk pelaksanaan

kegiatan.

- Belanja modal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Biaya tidak langsung, biaya yang tidak terkait secara langsung dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Namun secara keseluruhan biaya ini memiliki andil untuk ikut memperlancar dan menyukseskan kegiatan. antara lain :

- Biaya tenaga kerja tidak langsung
- Biaya pelatihan, pendidikan dan pindah tugas pegawai
- Biaya riset dan pengembangan
- Biaya Administrasi dan umum
- Biaya Penyusutan

- Klasifikasi biaya berdasarkan terhadap pembuatan keputusan

1. Biaya Tertanam (Sunk cost), yaitu biaya yang sudah dikeluarkan sehingga apapun keputusan yang dibuat saat ini tidak dapat mempengaruhi biaya yang sudah dikeluarkan karena biaya tersebut sudah terjadi dan tidak dapat dikembalikan kembali. Termasuk kedalam biaya tertanam adalah biaya-biaya historis

2. Biaya Relevan (Relevant cost), yaitu biaya yang masih akan dikeluarkan sehingga jadi tidaknya biaya tersebut dikeluarkan sangat tergantung pada keputusan yang dibuat. Seluruh biaya yang masih dianggarkan dapat dikategorikan biaya relevan

3. Biaya Oportunitas, Merupakan suatu bentuk pendapatan yang dikorbankan sehingga seolah-olah muncul biaya atas kesempatan yang dikorbankan itu. Meskipun biaya ini tidak riil tetapi sangat penting untuk mempertimbangkan pembuatan keputusan karena menyangkut alokasi biaya yang paling efisien dan efektif

- Klasifikasi biaya berdasarkan terhadap pengendalian manajemen

1. Biaya terkendali (Controllable cost), yaitu biaya yang dapat dikendalikan oleh pihak manajemen melalui kebijakan yang

ditetapkan. Biaya terkendali juga sering disebut biaya kebijakan karena besar-kecilnya biaya dipengaruhi oleh kebijakan manajemen, antara lain :

- Biaya perjalanan dinas
- Biaya promosi dan pemasaran
- Biaya tamu
- Biaya makan dan minum
- Biaya konsumsi
- Biaya komunikasi

Untuk mengendalikan biaya ini, yang harus dilakukan manajer publik adalah menerapkan anggaran ketat (hard budget) yaitu melakukan efisiensi dan penghematan secara ketat

- Klasifikasi biaya berdasarkan berdasarkan masa manfaat biaya
 1. Biaya Operasional, yaitu biaya yang masa manfaat biaya tersebut kurang dari satu tahun anggaran. Biaya operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari atau yang bersifat rutin. Biaya operasional antara lain :
 - Biaya Pegawai
 - Biaya Administrasi dan Umum
 - Biaya Pemasaran
 - Biaya Bunga
 - Biaya Subsidi
 - Biaya Hibah dan Bantuan Sosial
 - Biaya bantuan keuangan
 2. Biaya Modal, yaitu biaya yang masa manfaat lebih dari satu tahun

2.6 Review Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- Lilik Yunanto, Fakultas Ekonomi, Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret 2010 dengan judul “Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektifitas, dan Elastisitas Pajak Hotel di

Kabupaten Klaten”. Hasil penelitiannya selama kurun waktu dari mulai tahun 2003-2008, pajak daerah cenderung meningkat dan hanya pada tahun 2005 saja yang mengalami penurunan. Potensi pajak hotel di Kabupaten Klaten ternyata jauh lebih besar dibanding dengan realisasi maupun taerget yang ditetapkan. Rata-rata potensi pajak hotel Kab, Klaten Tahun 2003-2008 sebesar Rp. 250.514.310 lebih tinggi dibanding rata-rata penetapan target tahun 2003-2008 yang hanya sebesar Rp. 91.166.667. Efisiensi dan efektifitas pajak hotel taun 2003-2008 relatif baik, namun upaya pajak hotel kecil karena penerimaan pajak hotel mempunyai pengaruh yang kecil terhadap PDRB.

- Ira Hardiana Kusuma, dengan judul “Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Rangka Meningkatkan PAD di kota Madiun”. Hasil penelitiannya adalah bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran selama tahun 2000 sampai tahun 2004 sudah efektif dan efisien, dengan rasio rata-rata 1,14% pe tahun dan 0,24% per tahun. Disamping itu, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah terbukti dengan rasio 0,13% dan 0,12% per tahun.
- Dini Nurmayasari Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro. Dengan judul “Analisis penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk. Sehingga akan lebih baik apabila digunakan digunakan pendekatan lain untuk mengukur pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame, seperti dengan melihat taraf hidup penduduk.
- Fikri Zuhri Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Dengan Judul “ Analisa Efektifitas dan Efisiensi Pajak Restoran Di Kota Padang”. hasil penelitian menunjukan pemungutan Pajak Restoran di Kota Padang Telah Efektif dan Efisien.

- Mutia Fatchanie Fakultas Ekonomi Unifersitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan Judul “Analisa Efisiensi dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Sleman “ Hasil Penelitian Menunjukkan Efisiensi dari pemungutan Pajak Parkir yang di lakukan Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun mengalami semakin efisien,efektivitas pemungutan Pajak Parkir tidak menunjukkan *progress* dalam artian berjalan fluktuatif dari tahun ketahun.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis seberapa efisien dan efektif pemungutan pajak reklame di Kota Padang.

3.2 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini digunakan satu variabel saja yaitu variabel pajak reklame. Penelitian ini mengukur efisiensi dan efektifitas pajak reklame di kota Padang. Data yang diambil Tiga tahun yaitu tahun 2008 dan 2010.

3.3 Jenis dan Sumber Data

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus diperoleh dengan cara wawancara dan tanya jawab langsung dengan pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang peneliti peroleh dari buku, artikel, undang-undang, dan perda yang berlaku. Data sekunder yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran dari penerimaan pajak daerah selama 3 tahun dari mulai tahun 2008 sampai tahun

2010 dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak reklame.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berasal dari sumber internal yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode ini dilakukan melalui pencarian berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, seperti surat keputusan, peraturan lainnya termasuk undang-undang perpajakan, dan berbagai literatur yang sesuai dengan penelitian.

2. Metode Penelitian Lapangan

Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan yang dikaitkan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan petugas DPKA kota Padang bagian penagihan pajak.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah:

1. Menghitung Efisiensi Pajak Reklame

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara biaya pemungutan pajak reklame dengan realisasi pajak reklame. pemungutan yang dimaksud disini adalah biaya kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan

subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya, sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target dari pajak reklame yang telah dicapai. Efisiensi semakin besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan dari sektor pajak ditekan serendah mungkin dengan hasil yang akan diperoleh dari pajak tersebut (Devas: 1989), atau bisa juga dikatakan efisien apabila perbandingan biaya dengan realisasi yang telah dicapai nilainya semakin kecil.

Rumus pengukuran efisiensi untuk pemungutan pajak reklame:

$$\text{Efisiensi Pajak Reklame} = \frac{\text{biaya pemungutan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pajak Reklame}} \times 100 \%$$

Penerimaan pajak reklame dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari biaya pemungutannya. Semakin kecil rasio maka semakin efisien (Medi: 1996).

Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu :

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.

Apabila hasilnya >85 % berarti tidak efisien.

Tabel 3.1 Klasifikasi biaya berdasarkan PP 24 tahun 2005 dan permendagri 59/2007

Keterangan	PP 58/2005 dan permendagri 59/2007	PP 24 tahun 2005
Dasar pengklasifikasian belanja	<p>Belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungan dengan aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja tidak langsung 2. Belanja langsung 	<p>Belanja di klasifikasikan berdasarkan masa manfaat belanja, sehingga belanja dikelompokkan menjadi :</p>

		1. belanja operasi 2. belanja modal 3. belanja tidak terduga
Jenis belanja	Jenis belanja untuk masing-masing kelompok belanja terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - Belanja pegawai - Belanja bungan - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan keuangan - Belanja bantuan sosial - Belanja tidak terduga Belanja Langsung : <ul style="list-style-type: none"> - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal 	Jenis belanja untuk masing-masing kelompok diatas: 1. belanja operasi <ul style="list-style-type: none"> - belanja pegawai - belanja barang dan jasa - belanja subsidi - belanja hibah - belanja bantuan keuangan -belanja bantuan sosial 2.belanja modal <ul style="list-style-type: none"> -belanja aset tetap -belanja aset lain nya 3. belanja tidak terduga
Transfer ke kabupaten kota atau desa	Dimasukkan kedalam belanja tidak langsung yaitu belanja bantuan keuangan	Tidak di masukkan kedalam belanja operasi tetapi dipisahkan tersendiri dalam pos temsfer
Pengakuan belanja modal dalam neraca	Barang modal yang diakui atau dicatat adalah sebesar nilai barang modal saja,tidak termasuk biaya pengadaan nya.belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan barang modal tidak	Barang modal yang diakui dalam neraca meliputi nilai barang modal yang dibeli ditambah biaya-biaya yang terkait dengan

	diakumulasikan dalam barang modal	pengadaan barang modal
--	-----------------------------------	------------------------

Sumber : Mahmudi 2009

Untuk menghitung biaya pemungutan pajak biaya dikelompokkan kedalam biaya langsung dan biaya tidak langsung :

Biaya Tidak Langsung :

- a) *Belanja Pegawai.*
- b) *Insentif Pajak.*
- c) *Penyediaan jasa komunikasi.*
- d) *Pemeliharaan dan perizinan kendaraan.*
- e) *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.*
- f) *Penyediaan makanan dan minuman*
- g) *Sosialisasi Pajak dan Retribusi*

Biaya Langsung :

- a) *Penertiban dan pembongkaran reklame.*
- b) *Sistem informasi Reklame*
- c) *Pembuatan bener tempat pemasangan reklame*

2. Menghitung Efektifitas Pajak Reklame

Efektifitas berfokus pada outcome (tujuan/target yang ditetapkan). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi: 2009).

Rumus pengukuran efektifitas untuk pemungutan pajak reklame:

$$\text{Efektifitas Pajak Reklame} = \frac{\text{realisasi pajak reklame}}{\text{target pajak reklame}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektifitas diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal keberhasilan rasio adalah 100% atau 1 dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat berada pada $00^{\circ} 44' 00'' - 01^{\circ} 08' 35''$ LS dan $100^{\circ} 05' 05'' - 100^{\circ} 34' 09''$ BT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, kota Padang memiliki luas wilayah yaitu 694,96 Km^2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Padang Pariaman
Sebelah Selatan	: Kabupaten Pesisir Selatan
Sebelah Barat	: Samudera Hindia
Sebelah Timur	: Kabupaten Solok

Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Bayur dengan luas 38,6 Km^2 , Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan dengan luas 25 Km^2 , dan Pulau Pisang Gadang dengan luas 21,12 Km^2 juga di Kecamatan Padang Selatan.

2. Kondisi Topografi

Wilayah daratan kota Padang memiliki ketinggian antara 0 – 1.853 m diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang juga memiliki banyak sungai yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil dengan sungai terpanjang yaitu Sungai Batang Kandis sepanjang 20 Km. Tingkat curah hujan kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan. Suhu udaranya cukup tinggi yaitu berkisar antara 230-320 C. Kelembabannya berkisar antara 78-81%.

3. Visi dan Misi Kota Padang

a. Visi Kota Padang

Visi kota Padang adalah “Terwujudnya warga kota Padang yang berbudaya tinggi dengan adat dan kebudayaan minangkabau sebagai nilai dasar utama dengan keimanan dan ketakwaan yang berkualitas serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi”.

b. Misi kota Padang

Misi kota Padang terdiri dari:

1. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, seni, dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas SDM.
3. Meningkatkan fungsi dan modal UKM serta perluasaan akses pasar.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kota.
5. Menegakkan supremasi hukum.
6. Meningkatkan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintah.
7. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam meningkatkan fungsi dan peranan kelembagaan.
8. Pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan.

4.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bentuk organisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom telah melakukan penyesuaian organisasi

perangkat daerah dengan PP No.41 Tahun 2007. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang terdiri dari:

1. Badan

- a. **Badan Pembangunan Daerah (Bappeda)**
- b. **Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)**
- c. **Badan Kepegawaian Daerah (BKD)**
- d. **Badan Komunikasi dan Informasi (Bakominfo)**
- e. **Badan Kependudukan dan Catatan Sipil**
- f. **Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda)**
- g. **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB)**

2. Dinas

- a. **Dinas Pariwisata**
- b. **Dinas Kelautan dan Perikanan**
- c. **Dinas Perhubungan**
- d. **Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB)**
- e. **Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja**
- f. **Dinas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana**
- g. **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi**
- h. **Dinas Kebersihan dan Pertamanan**
- i. **Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan**
- j. **Dinas Pendidikan**
- k. **Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil)**
- l. **Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA)**
- m. **Dinas Pasar**
- n. **Dinas Kesehatan Kota (DKK)**

3. Kantor

- a. **Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**

- b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Kantor Pusat Pelayanan Umum (KPPU)

4. Bagian

- a. Bagian Organisasi
- b. Bagian Pemerintahan
- c. Bagian Hukum
- d. Bagian Perekonomian
- e. Bagian Bina Sosial
- f. Bagian Pertanahan
- g. Bagian Pembangunan
- h. Bagian Keuangan
- i. Bagian Umum
- j. Bagian Perlengkapan
- k. Bagian Penanaman Modal

5. Lainnya

- a. Sekretariat DPRD
- b. Komisi Pemilihan Umum
- c. Badan Pusat Statistik (BPS)
- d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

4.3 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan agar lebih terarah dan terfokus pada hasil yang akan dicapai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah lintas sektor dan unit kerja serta berfungsi melaksanakan penerbitan Ketetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah. menyusun RAPBD. kegiatan Perbendaharaan dan Verifikasi serta Ketatausahaan Dinas.

4.4 Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas DPKA;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPKA Kota Padang membawahi:

- (1) Sub Bagian Umum;
- (2) Sub Bagian Keuangan;
- (3) Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Pendapatan.

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pendapatan;
- b. Menyusun kebijakan teknis sistem pendataan, penetapan pajak dan retribusi;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pendapatan daerah.
- d. Melaksanakan pendataan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta Administrasinya;
- e. Penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tentang sumber-sumber pendapatan daerah ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan DPKA Kota Padaang membawahi:

- (1) Seksi Pajak ;
- (2) Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- (3) Seksi Pendataan dan Penetapan.

4. Bidang Penagihan.

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- a. Mengolah, menghimpun, dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang penagihan;
- b. Menyusun kebijakan teknis sistem pembinaan, penyuluhan, penagihan dan pengawasan pendapatan daerah;
- c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas penyuluhan penagihan dan pengawasan pendapatan daerah;
- d. Mengkoordinir proses permohonan wajib pajak dan retribusi dalam hal terdapatnya pembayaran pajak dan retribusi;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam hal pemrosesan keberatan dari wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. Membuat evaluasi dan laporan penyetoran wajib pajak dan retribusi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan DPKA Kota Padang membawahi:

- (1) Seksi Informasi dan Penyuluhan;
- (2) Seksi Penagihan;
- (3) Seksi Pengawasan dan retribusi.

5. Bidang Anggaran.

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyampaian bahan dan perumusan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD dan perubahan APBD.
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pinjaman, investasi, dana cadangan dan piutang;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan pemberian hibah, bantuan sosial dan subsidi;
- d. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD, peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD;
- e. Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan TAPD;

- f. Melaksanakan pengendalian anggaran;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran DPKA Kota Padang membawahi:

- (1) Seksi Anggaran Pemerintah;
- (2) Seksi Anggaran Ekonomi;
- (3) Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial Budaya.

6. Bidang Aset.

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sistem pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
- b. Pengolahan, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang aset;
- c. Pelaksanaan kegiatan penilaian aset daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penghapusan aset daerah;
- e. Pelaksanaan pencatatan kepemilikan kekayaan daerah serta menyimpan bukti aslinya;
- f. Pelaksanaan dan menyelenggarakan pemutakhiran data aset daerah;
- g. Pelaksanaan dan menyelenggarakan, pencatatan dan pelaporan aset daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset DPKA Kota Padang membawahi:

- (1) Seksi Pencatatan dan Pelaporan Aset;
- (2) Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.

7. Bidang Akuntansi Pelaporan.

Bidang Akuntansi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang akuntansi pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- b. Penyiapan bahan sistem akuntansi pemerintah daerah;
- c. Penyelenggaraan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset, dan selain kas pada SKPD;
- d. Penyiapan laporan arus kas secara periodik;
- e. Penyusunan laporan realisasi semester I APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester I anggaran pendapatan dan belanja SKPD
- f. Melakukan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pada SKPD
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi Palaporan DPKA Kota Padang membawahi:

- (1) Seksi Pencatatan danPembukuan ;
- (2) Seksi Pelaporan.

8. Bidang Bendahara Umum Daerah.

Bidang Bendahara Umum Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi:

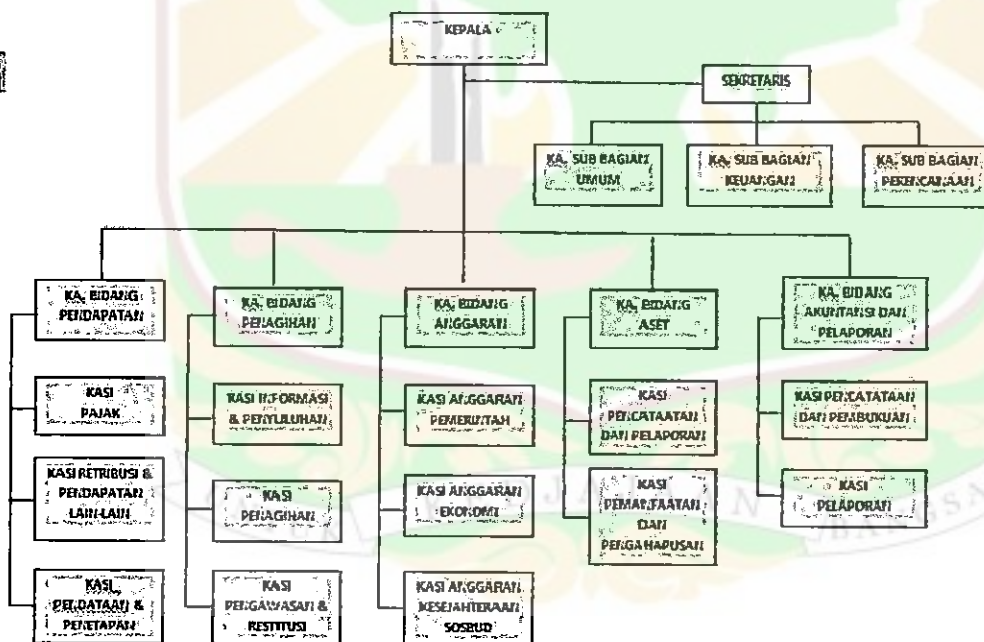
- a. Penyiapan anggaran kas;
- b. Penyiapan SPD untuk ditandatangani oleh PPKD;
- c. Penerbitan SP2D;
- d. Membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Walikota;
- e. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- f. Pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD oleh bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk;

- g. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- h. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- i. Melaksanakan pengelolaan piutang daerah;
- j. Pengelolaan dana cadangan;
- k. Penyusunan laporan arus kas secara periodic kepada walikota;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Bendahara Umum Daerah DPKA Kota Padang membawahi:

- (1) Seksi Penatausahaan;
- (2) Seksi Penerimaan;
- (3) Pengeluaran.

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi DPKA Kota Padang



4.5 Operasional Kegiatan Pemungutan Pajak Reklame

1.Jumlah Pegawai,Komposisi Pendidikan, dan Pangkat Pada Bidang Pendapatan.

Tabel.4.1 Komposisi Pendidikan Bidang Pendapata DPKA Kota Padang

No	Ketera Ngan	Disiplin Ilmu				Jumlah	
		Eko (A)	Akt (B)	Ilmu Kenotarisan (C)	Selain A,B,& C	Org	%
1	S2	-	-	-	1	1	1.9
2	S1	9	-	-	8	17	32.1
3	Diploma	2	-	-	-	2	3.8
4	SLTA	-	-	-	-	34	62.2
Total Akhir						54	100.00

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Bidang Pendapatan DPKA Kota Padang didominasi oleh pendidikan SLTA sebanyak 33 orang, Pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 2 orang, pegawai dari jenjang pendidikan S1 bidang ekonomi 9 orang dan selain dari jurusan ekonomi 8 orang, sedangkan pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ekonomi 1 orang. Dilihat dari tabel diatas pegawai yang berasal dari bidang ekonomi hanya 9 orang.

Tabel.4.2 Jumlah Pegawai dan Pangkat Bidang Pendapatan

Golongan	Jabatan	Jumlah Pegawai
III/c	Kepela Bidang Pendapatan	1
III/d	Kasi Pajak	1
III/c	Kasi Pendapatan dan penetapan	1
III/d	Kasi Retri dan Pendapatan lain2	1
III/d	Staf	2
III/c	Staf	2
III/b	Staf	17
III/a	Staf	6
II/d	Staf	3
II/c	Staf	2

II/b	Staf	5
II/a	Staf	8
	Jumlah total	50

Sumber : data diolah

a. Sarana dan Prasarana

Dalam Operasional dilapangan Pajak Reklame untuk melakukan pengawasan dan pembongkaran khusus untuk pajak reklame terdapat sarana berupa:

1. Dua buah mobil pick up
2. Sepuluh buah kendaraan roda dua
3. Dua unit komputer
4. Dua unit printer

4.6 Penyelenggara Reklame

Penyelenggara reklame adalah :

a. Pemilik reklame/produk

Yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.

b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

Yaitu badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan Advertising yang akan dikirimkan surat pemberitahuan pembayaran retribusi sewa tanah titik lokasi reklame :

Tabel 4.3 Daftar Nama Perusahaan yang dikirim Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Sewa Tanah Reklame

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	KADE Advertising	JL.Linggar Jati I/2 Padang
2	SPEED Advertising	JL. Gajah Mada no 25 Padang
3	PT Buana Lestari Indonesia	JL. S.Parman No 208 U-V Padang
4	CV.Dedewis Advertising	JL.Raya By Pass Km 7 Padang

5	CV.Multi Media Utama Advertising	JL.Puma No 3 Padang
6	CV.Prisma Advertising	JL.Juanda Padang
7	CV.Mata Hati	JL.Berok Padang
8	CV.Emil Printing	JL.Mangunsakoro No 9 Padang
9	CV.Advi Multi Kreasi	JL.Pasar Mudik No 86 Padang
10	PT,Pola Citra Mandiri	JL Gajah Mada Padang
11	Penta Advertising	JL.Sawah liek Padang
12	Narita Advertising	JL.Bajak V gg Bahagia No 112 C Medan
13	PT Ody Lestari	JL.selamat No 40 Medan
14	ACC Advertising	JL S.Parman Medan
15	Bintang Advertising	JL.Kayu Kalek Padang
16	Budh Advertising	JL.Sutomo Padang
17	PT.Network Armas Artindo	JL.Wy Kambas 6542 Medan

Sumber : DPKA Kota Padang

4.7 Pendapatan Regional

b. Perkembangan PDRB Kota Padang.

Pada Tahun 2010 secara nominal terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang atas dasar harga berlaku, dimana tahun 2009 PDRB Kota Padang adalah sebesar 21 837,05 milyar rupiah mejadi 24 586,37 milyar rupiah tahun 2010.Keadaan tersebut belum mencerminkan perbaikan produktifitas ekonomi secara riil,karena masih mengandung unsur inflasi.Produktifitas ekonomi Kota Padang secara riil bisa dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000.yang mencapai 12 021,69 milyar rupiah tahun 2010 naik dari 11 345,64 milyar rupiah tahun 2009.

c. Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2010 adalah sebesar 5,96 persen, merupakan hasil penjumlahan dari nilai yang dibentuk oleh setiap sektor ekonomi dalam membentuk PDRB Kota Padan, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen, pertambangan dan penggalian

mengalami pertumbuhan sebesar 6,84 persen, industri pengolahan tumbuh 4,54 persen, sektor listrik, gas, dan air minum tumbuh 5,6 persen, sektor bangunan tumbuh 7,52 persen, sektor perdagangan, hotel, restoran, tumbuh sebesar 4,63 persen, pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 6,68 persen dan sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 5,55 persen.

d. Struktur Perekonomian Kota Padang.

Sebagai ibukota Sumatra Barat Kota Padang dapat dikatakan tidak termasuk daerah agraris, tetapi sudah termasuk daerah pusat perdagangan. Dimana dari hasil perhitungan yang dilakukan, Pembentuk PDRB Kota Padang paling besar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 24,18 persen, kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran 21,15 persen, jasa 16,7 persen, industri pengolahan 14,89 persen, bank dan sektor keuangan lainya 8,62 persen, bangunan sebesar 4,88 persen, sektor bangunan 4,88 persen, listrik dan air minum 2 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 1,69 persen.

e. PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Padang.

Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) perkapita Kota Padang tahun 2010, memperlihatkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya ini disebabkan meningkatnya nilai PDRB dan relatif rendah nya pertumbuhan penduduk kota padang secara konsepsional PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun Kota Padang pada tahun yang sama.

PDRB Perkapita Kota Padang pada tahun 2010 mencapai 29 495,55 ribu rupiah naik 26 555,91 ribu rupiah pada tahun 2009. Setelah Penyusutan dan Pajak tak langsung dikeluarkan, diperoleh pendapatan regional perkapita sebesar 26 016 ribu rupiah tahun 2010, naik dari 23 519,08 ribu rupiah pada tahun 2009.

Tabel.4.4 PDRB Kota Padang Tahun 2008-2009 (Dalam Milyar)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
-------	--------------------------	--------------------------

2008	20 124,02	10 797,26
2009	21 837,05	11 345,64
2010	24 586,37	12 021,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

4.8 Mekanisme Izin Penyelenggaraan Reklame

Perizinan dan pengelolaan pajak reklame di Kota Padang dilakukan oleh DPKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset) .

Dalam hal perizinan pemasangan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana kota.

Adapun mekanisme penyelenggaraan reklame :

Pelaksanaan Pajak Reklame dimulai dari proses pendaftaran usahanya kepada Walikota Padang, dalam praktiknya umumnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Padang, tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Walikota dengan surat keputusan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta serta kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. Berdasarkan SPTPD, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan Pajak Reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD disini adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagih Pajak Daerah.

Pada saat mengajukan permohonan izin tertulis kepada Walikota Padang C/q Kepala Dinas Pengelolaan keuangan dan Asset Kota Padang, penyelenggara reklame harus melampirkan:

- a. Foto terbaru rencana lokasi / titik penempatan reklame.
- b. Surat perjanjian dengan pemilik tanah / bangunan jika reklame tersebut ditempatkan di tanah / bangunan masyarakat.
- c. Gambar / teks / produk reklame yang akan disampaikan dan atau di pasang pada billboard / papan / neon box / baliho dan sejenisnya.
- d. Gambar konstruksi reklame yang akan dipasang.
- e. Surat pernyataan penanggung jawaban jika terjadi kecelakaan / roboh terhadap reklame tersebut.
- f. Surat kuasa pemilik reklame bagi pengusaha yang dikuasakan.
- g. Surat pernyataan kepatuhan atas semua ketentuan pemasangan reklame.
- h. Contoh reklame selebaran dan sejenisnya yang akan diedarkan.

Setelah syarat tersebut dilampirkan, maka DPKA akan melakukan cek lapangan dan mengkoordinasikannya dengan dinas terkait :

- a. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota, mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang kelayakan titik lokasi pemasangan reklame tersebut sesuai dengan tata ruang kota. Dilihat apakah sudah sesuai dengan tata ruang kota, tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota.
- b. Dinas Kimpraswil
Mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang kelayakan konstruksi reklame tersebut.
- c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengeluarkan rekomenasi tertulis tentang pemasangan reklame yang berada di taman kota dan jalur hijau.
- d. Dinas Perhubungan, mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang pemasangan reklame yang menggunakan fasilitas transportasi seperti halte bus, reklame di kendaraan angkutan umum, dll.

e. Dinas Pekerjaan Umum

f. Bagian hukum

Setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan pemasangan reklame dianggap layak, tidak mengganggu keindahan kota, keselamatan, dll. Maka pihak DPKA akan mengeluarkan izin dan menetapkan pajak terutang serta uang jaminan.

Persetujuan atau penolakan izin dilakukan oleh DPKA atas nama walikota selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah persyaratan administrasi dan teknis diterima secara lengkap.

Reklame dapat dipasang dan diedarkan apabila telah menyelesaikan semua kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.9 Tata Cara Pemasangan Reklame

a. Untuk pemasangan reklame billboard, neon box, videotron dan sejenis yang ditanamkan secara langsung dengan menggunakan tiang :

- Bagi pemasangan reklame yang mengenai trotoar, tiangnya tidak dibenarkan ditanam di atas trotoar, akan tetapi harus di pinggir bagian dalam trotoar.
- Tinggi reklame di atas permukaan tanah minimal 3 meter.
- Reklame harus dipasang sejajar dengan badan jalan.
- Pemasangan reklame di persimpangan / prapatan jalan dan di jalur hijau, agar tidak mengganggu pandangan pengemudi lalu lintas.
- Pemasangan reklame tidak dibenarkan menghambat merk gedung, rambu lalu lintas dan sejenisnya.

b. Reklame yang di pasang pada bangunan, kendaraan, gerobak milik pihak lain dan sejenisnya:

- Pemasangan reklame harus lebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari pemilik bangunan, gerobak dan sejenisnya.
- Harus menterakan copy izin kepada pemilik bangunan, kendaraan, gerobak dan sejenisnya.

c. Reklame yang dipasang pada sarana / fasilitas kota dengan imbalan jasa disesuaikan dengan perjanjian kontrak

d. Reklame spanduk, umbul-umbul, gantungan dan sejenisnya :

- Pemasangan harus pada tempat yang disediakan
- Panjang spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya harus sesuai dengan tiang banner dikurangi dengan tali pengikat timbal balik 0,5 M
- Pemasangan spanduk diluar banner tidak boleh memotong jalan , mengambat atau menutup merk lain.

e. Reklame selebaran dan sejenisnya :

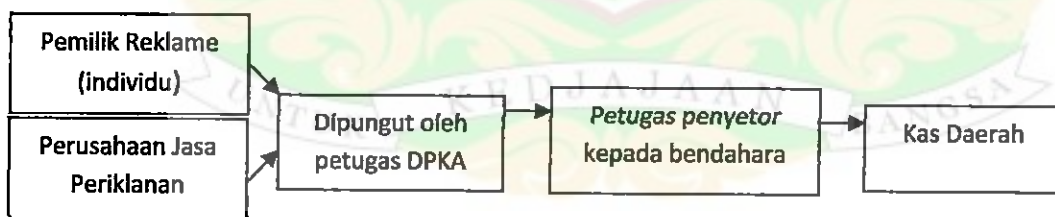
- Pemasangan selebaran harus pada tempat-tempat yang telah diizinkan.
- Pemasangan selebaran tidak boleh ditempelkan pada gedung-gedung pemerintah, rumah sakit, rumah ibadah, rambu-rambu lalu lintas, halte bis, jembatan penyeberangan, dan sejenisnya.

f. Bagi reklame lainnya akan diatur lebih lanjut sesuai situasi dan kondisi setempat.

System pemungutan dan penyetoran penerimaan Pajak reklame yang dipungut oleh petugas DPKA kepada penyelenggara reklame akan langsung disetor kepada bendahara DPKA dan bendahara akan memasukkan uang tersebut ke rekening kas daerah, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 4.2

Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame



4.10 Objek Pajak Reklame yang ada di Kota Padang dan Tarif Pajak Reklame

Pajak Reklame dikenakan adanya kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar di tempat umum. Dalam

pemasaran salah satu upaya untuk memperkenalkan produk adalah dengan cara promosi seperti iklan, reklame, promosi penjualan, dll. Oleh karena itu obyek reklame akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau industri.

1. Objek Pajak Reklame

a. Reklame Papan/Billboard/videotron/megatron

Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

Reklame megatron adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

b. Reklame Bersinar

c. Reklame kain

Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

d. Reklame Melekat (Stiker) dan Selebaran

Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain

e. Reklame Berjalan / Kendaraan

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

f. Reklame Udara

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

g. Reklame Suara

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

h. Papan Merk toko, notaries, dokter, konsultan dan sejenisnya.

i. Reklame Film atau Slide

Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

j. Reklame Peragaan

Reklame peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

2. Bukan objek pajak reklame

Yang menjadi pengecualian dari penyelenggaraan reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor.
- b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- c. Penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- d. Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada bangunan dan atau tanah tempat penyelenggaraan pertunjukkan yang semata-mata berhubungan dengan pertunjukan yang sedang atau akan diselenggarakan.
- e. Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Organisasi Internasional pada lokasi Badan-Badan yang dimaksud.

- f. Penyelenggaraan oleh organisasi politik atau organisasi sosial politik yang semata-mata mengenai politik.

3. Tarif Pajak Reklame

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang No. 13 Tahun 2005, maka tarif pajak reklame sebagai berikut :

Tabel 4.7 Tarif Pajak Reklamse Kota Padang

No	Jenis	Tarif Pajak									Keterangan
		lokasi sangat strategis			lokasi strategis			lokasi kurang strategis			
		sehari	sebulan	setahun	sehari	sebulan	setahun	sehari	sebulan	setahun	
1	reklame papan,bilboard, videotorn, megatorm	63.000	82.000	120.000	62.000	69.000	90.000	74.000	78.000	80.000	per m2
2	reklame bersinar	50.000	60.000	80.000	53.000	53.000	55.000	52.000	53.000	55.000	per m2
3	reklame kain,reklame melekat	6.000	25.000	305.000							per m2
4	stiker dan selebaran reklame	82.000	241.000	480.000							per m2
5	berjalan/kendaraan	57.000	61.000	76.000							per m2
6	reklame udara	76.000	115.000	375.000							per m2
7	reklame suara'reklame papan	Ditetapkan Rp 4,500 Perpelaksanaan									per m2
8	merek notaris,dokter dan sejenis	60.000	70.000	80.000	63.000	65.000	76.000	51.000	52.000	55.000	per m2
9	reklame film	Ditetapkan Rp15.000 satu hari									per m2
10	reklame peragaan	Ditetapkan Rp22.500 perperagaan									per m2

Sumber :DPKA Kota Padang

Keterangan :

Untuk pemasangan reklame papan /billboard / videotron / megatron, bersinar, berjalan / kendaraan, papan merk, dan udara cara penghitungan pajaknya berdasarkan kepada :

1. Untuk pemasangan 1 s.d 6 hari, pajaknya dihitung untuk 1 hari (berdasarkan table sehari)
2. Untuk pemasangan 1 minggu s.d 3 bulan, pajaknya dihitung untuk 1 bulan (berdasarkan table sebulan)
3. Untuk pemasangan lebih dari 3 bulan s.d 11 bulan, pajaknya dihitung untuk 1 tahun (berdasarkan table setahun)
4. Reklame udara yang dipasang lebih dari 15 Meter dari permukaan tanah ditambah pajaknya 50 % lagi.
5. Ukuran reklame yang berdesimal dua angka dibelakang koma dibulatkan keatas tiap 0,5 M.

Pajak Reklame ini mempunyai potensi yang cukup besar dan tidak terkena dampak krisis secara berarti. Ada kecenderungan bahwa segmen pajak ini mayoritas adalah golongan kaya yaitu para pengusaha dan investor baik local maupun asing, karena kelompok ini cenderung membelanjakan uangnya dengan porsi yang lebih besar untuk memasang reklame. Selain itu hanya kota-kota besarlah yang dapat menggali penerimaan dari pajak reklame.

4.11 Analisis Evektifitas Pajak Reklame

Evektifitas menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan sehingga evektifitas hanya mengukur dari sisi output. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi: 2007).

Rumus pengukuran evektifitas untuk pemungutan pajak reklame:

$$\text{Evektifitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisa Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Dari pengertian evektifitas diatas, dapat disimpulkan bahwa evektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal keberhasilan rasio adalah 100% atau 1 dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.

Di bawah ini disajikan tabel hasil perhitungan evektifitas pajak reklame Kota Padang tahun anggaran 2004 – 2010.

Tabel,4.6 Evektifitas Penerimaan Pajak ReklameKota Padang Tahun 2004-2009

No	Tahun	Target	Realisasi	%	Perubahan
1.	2004	1.000.000.000	1.123.599.075	112,36	-
2.	2005	2.600.000.000	2.644.714.057	101,72	Turun, 10.64
3.	2006	3.000.000.000	3.249.068.054	108,3	Naik, 6.58
4.	2007	3.000.000.000	3.266.373.785	108,8	Naik, 0.5
5.	2008	4.000.000.000	4.171.560.886	104,29	Turun,4.51
6.	2009	4.000.000.000	3.423.898.310	85,95	Turun, 18.95
7	2010	4.000.000.000	3.020.545.000	75,51	Turun, 10,44
8	2011	3.750.000000	3.597.016.400	95,92	Naik, 20.41

Sumber: data diolah

Tabel4.3 menunjukan bahwa tingkat evektifitas pajak reklame Kota Padang pada tahun anggaran 2004 sampai dengan 2010 bervariasi antara 75,51 persen sampai 112,36 persen atau dengan rata-rata sebesar 99,56 persen. Tingkat evektifitas terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 112,36 persen, sedangkan pada tahun 2005 tingkat evektifitas pajak reklame mengalami penurunan sebesar 101,72 persen. Kemudian pada tahun 2006 sebesar 108,3 persen. Dapat disimpulkan evektifitas pajak reklame mengalami fluktuatif dari tahun ketahun, tidak terjadi kenaikan yang bersifat progres atau kenaikan yang berkelanjutan.

4.12 Analisa Target Pajak Reklame Kota Padang

Perhitungan Target Pajak Tahun 2011 (dihitung Pada bulan oktober 2010)

Yang dilakukan Bidang Pendapatan DPKA Kota Padang.

A. Potensi Reklame Permanen (Dari Tahun 2010).

Realisasi Penerimaan Reklame s/d Bulan Oktober 2010

Reklame Papan : 746 SKP Rp 1.661.220.000

Papan Merek : 467 SKP Rp 117.432.000

Reklame Bersinar : 901 SKP Rp 535.601.500

Reklame Kendaraan : 71 SKP Rp 44.748.000

Jumlah : 2185 SKP Rp. 2.359.001.500

B. Potensi Reklame Tahun 2010 belum ditagih (nop-des). Rp. 497.859.050

Potensi kotor Tahun 2011 Rp. 2.856.860.500

C. Kemungkinan Keadaan Pada Tahun 2011.

Kemungkinan Potensi tidak tertagih pada tahun 2011 (10%) Rp. (285.686.050)

Potensi Bersih Reklame Permanen Rp. 2.571.174.450

Kemungkinan PemasReklame Baru 15% Rp. 428.529.075

Kemungkinan Penerimaan Dari Reklame

a. Kain : Rp 250.000.000

b. Selebaran : Rp 2.000.000 Rp 252.000.000 Rp 680.529.075

Rencana Target Tahun 2011 Rp 3.250.000.000

**Perhitungan Rencana Target Untuk tahun 2012 Yang dilakukan bidang
Pendapatan DPKA Kota Padang.(dihitung pada bulan juni 2010)**

A. Potensi Reklame Permanen (Dari Tahun 2011)

Realisasi Penerimaan Reklame s/d Bulan Juni 2011

Reklame Papan : 498 SKP Rp 1.143.310.000

Reklame Papan Merek : 330 SKP Rp 80.959.500

Reklame Bersinar : 680 SKP Rp 359.205.000

Reklame Kendaraan : 51 SKP Rp 41.646.000

Jumlah : 1559 SKP

Rp.1.625.120.500

B. Potensi Reklame Dari Tahun 2010 Yang Belum Tertagih(juli-des) Rp

1.382.243.500

Potensi Kotor untuk tahun 2012

Rp

3.007.364.000

C. Kemungkinan Keadaan 2012

Kemungkinan Potensi Tidak Tertagih (tidak memperpanjang)25%

Rp.

(751.841.000)

Potensi Bersih Pajak Reklame

Rp.

2.255.523.000

Penyesuaian Tarif p.merek, bersinar ke papan (50%)

Rp 1.112.775.500

Kemungkinan Pemasangan Baru tahun 2012 12%

Rp 360.883.680

Kemungkinan Penerimaan Dari Reklame Non Permanen

a. Kain : Rp.320.000.000

b. Selebaran : Rp. 2.000.000 Rp. 304.000.000

Rp

1.775.659.180

Rencana Penerimaan 2012 (Sebelum Kenaikan Tarif)

Rp

4.031.182.180

Potensi tidak tertagih pada tahun 2011 sebesar 25% menurut petugas yang melakukan perhitungan atas target pajak reklame sebagai akibat dari keputusan Pemerintah Kota Padang yang melarang pemasangan reklame pada medium jalan hal ini mengurangi potensi reklame, adanya pelarangan pemasangan reklame di medium jalan hal ini diperkirakan akan merugi pemasangan batu namun tidak signifikan dikarenakan keadaan ekonomi yang telah berangsur membaik. Dalam pengesahan target pajak dilakukan atas persetujuan DPRD Kota Padang pada saat pembahasan APBD, pihak DPRD dapat melakukan koreksi atas perhitungan target yang dilakukan seperti target tahun 2011 pihak Pemerintah Kota Padang Mengajukan target pajak sebesar Rp 3.250.000.000 namun pihak DPRD Kota Padang melakukan koreksi agar target dinaikan menjadi Rp 3.750.000.000 hal ini di sanggupi oleh Pemerintah Kota Padang.

Dari perhitungan target diatas tampak dalam penetapan target pajak ada komponen yang merupakan perkiraan yang sangat bergantung pada keadaan perekonomian tahun tersebut apabila perekonomian dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik target yang ditetapkan dapat tercapai bahkan dapat melampaui dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.13 Analisis Efisiensi Pajak Reklame

Penentuan biaya operasional sulit dilakukan karena biaya operasional yang dikeluarkan oleh DPKA tidak hanya dikeluarkan untuk memungut pajak reklame saja, tetapi juga untuk memperoleh pendapatan daerah lainnya atau yang dikeluarkan bersifat joint cost. Pengalokasian biaya untuk Pajak Reklame dengan Menggunakan Proporsi pajak Reklame yang di peroleh dibandingkan Pendapatan Daerah yang diperoleh DPKA secara keseluruhan.

$$\text{Biaya Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pendapatan daerah}} \times \text{Total Belanja}$$

Efisiensi pajak reklame dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efisiensi Pajak Reklame} = \frac{\text{biaya pemungutan pajak reklame}}{\text{realisasi pajak reklame}} \times 100\%$$

Penerimaan pajak reklame dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari biaya pemungutannya. Semakin kecil rasio maka semakin efisien (Medi: 1996).

Menurut Pendapat Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
3. Apabila hasilnya > 85 % berarti tidak efisien.

Biaya pemungutan Pajak Reklame dihitung dengan mengalokasikan biaya bersama yang digunakan untuk memperoleh pendapatan daerah lain nya, berikut untuk menghitung biaya untuk memperoleh pajak reklame:

Tabel.4.7 Dasar alokasi Biaya Pajak

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisais PAD	dasar alokasi biaya bersama
2008	4.171.560.886	117.728.886.788	0,035434
2009	3.423.898.310	85.278.408.678	0,040150
2010	3.020.545.000	78.618.110.807	0,038420
2011	3.597.336.400	103.375.997.572	0,034799

Sumber :Data diolah

Alokasi ini digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama dalam perhitungan biaya pajak reklame dari biaya DPKA secara keseluruhan.

Tabel 4.8.Biaya insentif atas realisasi pajak reklame:

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Biaya Insentif Pajak Reklame
2008	Rp.4.171.560.886	Rp.208.578.044
2009	Rp.3.423.898.310	Rp.171.194.916
2010	Rp.3.020.545.000	Rp.151.027.250

Sumber : Data diolah

Pemberian insentif 5% persen ini yang dihitung dari Realisasi Pajak yang diperoleh berdasarkan atas Berdasarkan atas PP 69 tahun 2010.

Perhitungan Biaya Pajak Reklame untuk Tahun 2008 :

Tabel 4.9 Perhitungan Biaya Pajak Reklame Tahun 2008

No	Kegiatan	Jumlah
	biaya tidak langsung	
1	belanja pegawai	8.673.105.953
	biaya langsung	
1	penyaediaan jassa surat menyurat	1.887.800
2	penyaediaan jassa komunikasi, listrik, air	9.269.781
3	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000
4	penyediaan alat tulis kantor	57.787.000

5	Penyediaan barang cetak	494.825.425
6	penyediaan barang cetak	3.500.000
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.075.000
8	pentediaan bahan bacaan dan peraturan	14.746.000
9	penyediaan makanan dan minuman	17.782.396
10	penyediaan peralatan kebersihan	4.100.000
11	Penyediaan jasa pelayana publik	10.000.000
12	Penyediaan database	773.623.400
13	Penyediaan sitem informasi pengelolaan gaji	19.900.000
14	pemeliharaan rutin kendaraan	391.038.395
15	pemeliharaan rutin perlengkapan gedung	8.417.926
16	pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	6.556.000
	pakaian dinas	21.867.000
	sosialisasi paket regulasi	99.710.000
	jumlah biaya bersama	10.667.192.076
	pendataan ulang pajak reklame	48.616.200
	sistem informasi reklame	85.279.250
	alokasi biaya bersama	377.977.253
	insentif 5 % dari realisasi pajak reklame	208.578.044
	total biaya pajak reklame th 2008	720.450.747

Sumber: Data diolah

Dari hasil Tabel diatas biaya yang menjadi dasar untuk perhitungan efisiensi untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp 720.450.747

Perhitungan Untuk Biaya Pajak Reklame Tahun 2009

Tabel 4.7 Perhitungan Biaya Pajak Reklame Tahun 2009

No	Kegiatan	biaya
1	Gaji, tunjangan, tambahan penghasilan	24.041.652.692
2	Penyediaan jasa surat-menyurat	3.402.750
3	penyediaan jasa telekomunikasi,listrik,air	6.302.481
4	penedian jasa peralatan dan perlengkapan	32.999.680
5	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan	7.672.438
6	penyediaan jasa kebersihan kantor	10.250.000
7	penyediaan alat tulis kantor	187.434.590

8	penyediaan barang cetakan	240.397.791
9	penyediaan komponen instalasi listrik	9.890.000
10	penyediaan bahan bacaan dan peraturan	17.652.800
11	penyediaan makanan dan minuman	65.522.512
12	pemeliharaan rutin kendaraan	477.558.130
13	pemeliharaan rutin gedung kantor	7.925.343
14	pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	23.515.862
15	pengadaan pakaian dinas	31.871.223
16	sosialisasi pajak dan retri busi	34.809.880
	jumlah biaya bersama	25.198.858.172
	alokasi untuk pajak reklame	1.011.725.350
	penertiban dan pembongkaran reklame	38.839.824
	pembuatan bener tempat pemasangan reklame	76.357.121
	insentif pajak reklame 5 % dari realisasi	171.194.916
	jumlah biaya pajak reklame tahun 2009	1.298.117.212

Sumber: Data diolah

Untuk tahun 2009 Biaya Pajak untuk Perhitungan Efisiensi adalah sebesar 1.298.117.212

Perhitungan Biaya Pajak Reklame untuk tahun 2010 adalah :

Tabel 4.8 Perhitungan Biaya Pajak Reklame Tahun 2010

No	Kegiatan	biaya
	Belanja Pegawai	18.759.333.116
1	Penyediaan jasa surat-menyurat	4.770.750
2	penyediaan jasa telekomunikasi, listrik, air	6.040.320
3	penedian jasa peralatan dan perlengkapan	12.352.080
4	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan	7.922.998
5	penyediaan jasa kebersihan kantor	10.147.500
6	penyediaan alat tulis kantor	128.248.667
7	penyediaan barang cetakan	318.068.226
8	penyediaan komponen instalasi listrik	25.549.936

9	penyediaan bahan bacaan dan peraturan	17.424.000
10	penyediaan makanan dan minuman	66.522.596
11	pemeliharaan rutin kendaraan	497.513.000
12	pemeliharaan rutin gedung kantor	44.025.131
15	sosialisasi pajak dan retri busi	83.513.103
	jumlah biaya bersama	19.981.431.424
	alokasi biaya untuk pajak reklame	767.696.046
	monitoring dan evaluasi pajak reklame	13.028.580
	penertiban dan pembongkaran reklame	44.223.590
	insentif realisasi pajak reklame 5 %	151.027.250
	total biaya pajak reklame	975.975.466

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan diatas biaya pajak untuk tahun 2010 adalah sebesar 975.975.466

Dari perhitungan biaya pajak reklame yang dilakukan dapat dilakukan analisa efisiensi.

Tabel 4.9 Perhitungan Efisiensi Pajak Reklame

Tahun	Biaya pemungutan Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2008	Rp 720.450.747	Rp 4.171.560.886	0,17270532	Sangat Efisien
2009	Rp 1.298.117.212	Rp 3.423.898.310	0,37913428	efisien
2010	Rp 975.975.466	Rp 3.020.545.000	0,32311237	efisien

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas secara berturut dari tahun 2008-2010 tingkat efisiensi pemungutan Pajak Reklame secara berurut adalah 17.2 % , 37.9%, 32,.% pada tahun 2008 pemungutan pajak dilakukan dengan sangat efisien.dan pada tahun 2009,2010 Pajak Reklame dapat dipungut dengan efisien.hal ini dapat terjadi karna menurunnya realisasi dari perolehan pajak reklame,turunnya realisasi ini bisa berhubungan dengan kejadian luar biasa gempa bumi yang menimpa Kota Padang yang berdampak pada keadaan perekonomian Kota Padang.Namun demikian dasar yang digunakan dalam

menentukan efisiensi ini dirasakan belum terlalu tepat, karna apa bila kita menggunakan standar ini untuk sebuah perusahaan bisnis dengan biaya yang mencapai 85% dari hasil yang diperoleh akan sangat janggal apabila kinerja dari manajemen dinilai masih efisien untuk itu di perlukan standar yang lebih tepat digunakan untuk penilaian kinerja.

4.14 Faktor penghambat yang dihadapi DPKA Kota Padang dalam pemungutan Pajak Reklame.

- a. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak atas ijin pemasangan reklame yang telah habis dan masih banyaknya wajib pajak yang lupa melakukan pendaftaran ulang. Memiliki pengetahuan belum tentu memiliki kesadaran untuk membayar pajak oleh sebab itu kurangnya kesadaran wajib pajak masih menjadi faktor penghambat DPKA Kota Padang dalam pemungutan pajak reklame.

4.15 Solusi yang ditempuh DPKA

- a. Meningkatkan Pengawasan
Pengawasan merupakan alat oleh aparat pemerintah untuk mengetahui dan mengontrol kemungkinan-kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh wajib pajak oleh sebab itu pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan agar pemungutan pajak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Peningkatan Mutu Pegawai dan Petugas Pemungut.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pegawai maupun petugas merupakan jembatan penghubung dengan wajib pajak oleh karena itu dengan adanya peningkatan mutu pegawai dan petugas merupakan langkah yang sangat tepat yang dilakukan oleh pemerintah.
- c. Memberlakukan sanksi bagi penyelenggara reklame yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku agar mereka bisa disiplin dalam melakukan kewajibannya.
- d. Perluasan objek pajak dengan cara pencarian sumber-sumber baru yang dapat digolongkan sebagai pajak reklame yang objek pajak reklame ini

sebelumnya tidak dikenai pajak, serta melakukan penambahan tempat-tempat pemasangan pajak reklame yang dianggap potensial.

- e. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan memperluas wajib pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak reklame yang ada di Kota Padang serta telah diterapkannya sanksi yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang dengan sengaja mengindari kewajiban pajaknya.
- f. Penyempurnaan administrasi pajak dan penyempurnaan undang-undang pajak serta penyempurnaan tarif.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemungutan pajak reklame di kota Padang selama 3 tahun mulai dari tahun 2008 sampai 2010 telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan diperolehnya hasil yang sangat efisien pada tahun 2008, walaupun pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan masih dapat disimpulkan efisien. Penurunan pada tahun 2009 dan 2010 dapat disebabkan pengaruh dari bencana alam yang berdampak langsung pada kegiatan perekonomian Kota Padang.
2. Dari sisi efektifitas, pemungutan pajak reklame di kota Padang tahun 2004-2010 mengalami fluktuatif tidak terjadi kenaikan yang bersifat Progres.
3. Target akan mempengaruhi Efektifitas dari kinerja DPKA dalam pemungutan Pajak reklame. Perkiraan yang tepat dalam memperkirakan keadaan ekonomi di tahun mendatang mempengaruhi penetapan Target pemungutan pajak yang wajar untuk diperoleh yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi petugas DPKA:
 - a. Hendaknya petugas DPKA lebih gencar mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak reklame terutama terkait dengan UU No. 28 Tahun 2009
 - b. Peningkatan profesionalisme petugas dan pegawai DPKA lebih ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan kerja atau diklat.
 - c. Terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak reklame, hendaknya petugas DPKA lebih tegas dalam memberikan sanksi.
2. Bagi peneliti selanjutnya:
 - a. Hendaknya menambah jangka waktu pengumpulan data dan lokasi penelitian agar data yang digunakan lebih lengkap.
 - b. Menambah variabel penelitian sehingga lebih akurat dan memberikan hasil yang lengkap.

c. Dalam menetapkan tingkat efisiensi dapat menggunakan tingkat yang lain selain yang telah penulis gunakan dalam hal ini penulis menyarankan tingkat efisiensi dapat dibagi kedalam Empat Tingkatan

1. Apabila hasilnya $< 15\%$ berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya $15\% - 20\%$ efisien.
3. Apabila hasilnya $35\% - 24\%$ kurang efisien
4. Apabila hasilnya $> 40\%$ tidak efisien

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dilakukan di satu wilayah saja yaitu kota Padang sehingga kurang mewakili gambaran tingkat efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak reklame secara keseluruhan yang ada di seluruh provinsi di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sumatera Barat khususnya.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari satu instansi pemerintahan saja yaitu dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Padang.

Daftar Pustaka

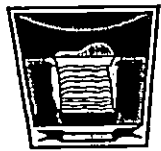
- Direktorat Jenderal Pajak UU No. 33 tahun 2004 yang merupakan perubahan undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mahmudi.2010."Manajemen Keuangan Daerah" Yogyakarta : Erlangga.
- Edinov, sally. 2007. "Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang". Padang : Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Hasan, Iqbal.2004. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurmayasari, Dini, 2010. Analisis penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang. Semarang. Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro
- Peraturan Daerah Kota Padang. Perda Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.
- Resmi, Siti. 2008. "Perpajakan Teori dan Kasus edisi 4". Yogyakarta : Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2006. "Research Methods for Business". Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2008. "Pajak daerah dan retribusi daerah". Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Hindarto Prasetyo. 2006. "Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000-2004". Semarang : Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Ahmadi,Adib.2005."Panduan Pengawasan Keuangan Daerah".Jakarta:Masyarakat Transparasi Indonesia.
- Medi,Setianus.1996.Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur."Tesis S2"Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.

Suandi,Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat

Devas,nick. 1989. Keuangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarat : UI Pres

Devas,Nick.1998.”Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab “.Jakarta :Lidabang Depdagri





PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.01.84/Kesbang/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

1. Surat dari Kejur Akuntansi Fakultas Ekonomi UNAND

Nomor : UN.16/PP/155/M

tanggal 13 Juni 2011

2. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 18 Januari 2012

Anggapan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: ANDI MARTA PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir	: Solok, 04 Maret 1986
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Binuang Kampung Dalam No.10 Pauh
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Analisa Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Reklame di Kota Padang
Waktu/Lama Penelitian	: 2 (dua) bulan
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	: DPKA Kota Padang
Anggota Rombongan	: -

Anggapan ketentuan sebagai berikut :

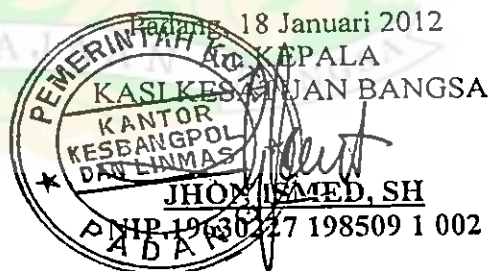
Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.

5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas. maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.



Diteruskan Kepada Yth,

1. Kepala DPKA Kota Padang
2. Kejur Akuntansi Fakultas Ekonomi UNAND
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

A. VISI DAN MISI

Visi

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah”.

Misi

- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, dan aset melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya aparatur
- Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dengan stake holders dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBD.
- Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang profesional dan berkelanjutan.
- Mewujudkan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan.

B. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2010

1. Program Kegiatan

a. Belanja Tidak langsung

No	Kegiatan	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik (%)	Keuangan (%)		
1.	Belanja Pegawai Rp. 21.935.609.350,45	100	85,52	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan PNS	Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS
2.	Belanja Hibah Rp. 32.479.721.382,-	100	76,55	Tersedianya dana belanja hibah	Terbayarnya belanja hibah untuk tahun 2010
3.	Belanja Bantuan Sosial Rp. 14.599.008.819,-	100	90,20	Tersedianya dana untuk bantuan sosial	Terbayarnya bantuan sosial untuk tahun 2010
4.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 42.701.816.766,-	100	91,77	Tersedianya dana untuk bantuan keuangan	Terbayarnya bantuan keuangan untuk tahun 2010
5.	Belanja Tidak Terduga Rp. 5.445.645.800,00	100	96,24	Tersedianya dana untuk belanja tidak terduga	Terbayarnya belanja tak terduga untuk tahun 2010

b. Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik (%)	Keuangan (%)		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 7.500.000,-	100	63,61	Tersedianya dana pembayaran jasa administrasi selama 12 bulan	Terlaksananya jasa administrasi selama 12 bulan

2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 15.600.000,-	100	38,72	Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik, selama 12 bulan	Jasa Komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 15.600.000,-	100	79,18	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 11.351.000,-	100	69,80	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas selama 12 bulan	Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang siap pakai
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 10.250.000,-	100	99	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 129.583.376,-	100	98,97	Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
7.	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Rp. 333.230.200,-	100	95,45	Tersedianya barang cetakan kantor dan sekolah selama 12 bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor dan sekolah
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 28.089.500,-	100	90,96	Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor selama 12 bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 177.197.500,-	100	92,17	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 19.360.000,-	100	90,07	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan wawasan dan pengetahuan pegawai
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 72.520.000,-	100	91,73	Tersedianya makanan dan minuman untuk kelancaran kegiatan perkantoran selama 12 bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp. 285.225.000,-	100	96,96	Tersedianya dana rapat dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
13.	Peningkatan Jasa Pelayanan Publik Rp. 313.688.400,-	100	98,61	Tersedianya dana untuk pembayaran gaji pegawai honorer selama 12 bulan	Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer
14.	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Kantor Rp. 76.326.000,-	100	38,82	Tersedianya dana untuk pembayaran gaji pegawai harian selama 12 bulan	Peningkatan kesejahteraan pegawai harian

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik (%)	Keuangan (%)		
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 124.300.000,-	20	12,53	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional siap pakai untuk kelancaran pelaksanaan tugas

2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 512.900.000,-	100	97,03	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor Rp. 48.475.150,-	100	90,82	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik (%)	Keuangan (%)		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 10.000.000,-	100	87,04	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan dan analisis kinerja SKPD	Tersajinya laporan keuangan dan analisis kinerja SKPD

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Kegiatan	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik (%)	Keuangan (%)		
1.	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2011 Rp. 159.114.750,-	90	77,44	Terlaksananya penyusunan Ranperda APBD tahun 2011	Buku Ranperda APBD tahun 2011
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2011 Rp. 56.182.500,-	90	7,19	Terlaksananya penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran APBD tahun 2011	Buku Penjabaran APBD tahun 2011
3.	Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2010 Rp. 181.420.000,-	100	97,53	Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2010	Buku Ranperda APBD Perubahan tahun 2010
4.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2010 Rp. 55.907.500,-	100	96,77	Terlaksananya penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2010	Buku Penjabaran APBD Perubahan tahun 2010
5.	Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2009 Rp. 181.580.000,-	100	98,54	Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2009	Buku Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2009
6.	Penunjang Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (DPIPD) Rp. 26.505.000,-	90	41,16	Terlaksananya penunjang pengembangan SIPKD	Tersedianya sarana penunjang pengembangan SIPKD
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	100	96,52	Terlaksananya penyusunan Ranperwako tentang Penjabaran	Buku Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009 Rp. 70.150.000,-			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2009	tahun 2009
8.	Asistensi Pengelolaan Keuangan Rp. 106.883.000,-	100	99,03	Terlaksananya asistensi pengelolaan keuangan	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang
9.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Rp. 75.500.000,-	100	92,50	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Data sumber dan potensi pendapatan daerah
10.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Bagi Hasil Pajak Rp. 897.388.000,-	100	76,85	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber bagi hasil pajak	Data sumber dan potensi bagi hasil pajak
11.	Penatausahaan Keuangan Rp. 365.827.000,-	100	91,72	Terlaksananya penatausahaan keuangan	Pencairan dana SKPD dan kelancaran pelaksanaan kegiatan SKPD
12.	Pembinaan Administrasi Keuangan Rp. 70.179.000,-	100	96,86	Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan	Tertib administrasi keuangan SKPD sesuai aturan yang berlaku
13.	Penghapusan Aset Pemda Rp. 99.440.000,-	100	97,34	Terlaksananya penghapusan aset Pemda	SK Penghapusan Aset dan perhitungannya
14.	Monitoring dan Evaluasi Pajak Reklame Rp. 18.882.000,-	5	0,69	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pajak reklame	Evaluasi dan peningkatan pendapatan pajak reklame
15.	Pengendalian Anggaran dan Penyusunan DPA-SKPD Rp. 121.365.000,-	100	67,61	Terlaksananya pengendalian anggaran dan penyusunan DPA SKPD	DPA - SKPD
16.	SIPKD/SIKD Rp. 62.605.119,18	100	76,22	Terlaksananya kegiatan SIPKD/SIKD	Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPKD
17.	Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang Rp. 3.862.500,-	50	6,89	Terlaksananya penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang	Penyelesaian TPTGR oleh MP - TPTGR
18.	Penyusunan Ranperda dan Ranperwako APBD Tahun 2010 Rp. 126.085.000,-	100	97,64	Terlaksananya penyusunan Ranperda dan Ranperwako APBD tahun 2010	Ranperda dan Ranperwako APBD Tahun 2010
19.	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang Rp. 48.576.000,-	100	91,04	Terlaksananya penertiban dan pembongkaran reklame di Kota Padang	Penegakan aturan dan peningkatan ketertiban dan keindahan Kota Padang
20.	Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Rp. 89.577.500,-	100	93,23	Terlaksananya kajian potensi pajak dan retribusi	Data potensi pajak dan retribusi
21.	Validasi Data Aset Rp. 90.000.000,-	100	80,03	Terlaksananya validasi data aset	Data aset Pemerintah Kota Padang yang benar dan akurat

22.	Sosialisasi Dalam Rangka Pembekalan Kolektor PBB Rp. 64.075.000,-	100	96,47	Terlaksananya sosialisasi pembekalan kolektor PBB	Peningkatan pemahaman dan kemampuan kolektor PBB dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan PBB
23.	Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB Rp. 1.186.747.100,-	100	99,93	Terlaksananya percepatan pencapaian target penerimaan PBB	Peningkatan realisasi penerimaan PBB
24.	Pembuatan Papanisasi Rp. 15.575.000,-	100	84,43	Terlaksananya pembuatan papanisasi	Data struktur organisasi dan aset daerah
25.	Pendataan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 219.788.000,-	100	66,76	Terlaksananya pendataan potensi PBB	Data potensi PBB
26.	Penyusunan Ranperda Pajak Rp. 124.257.900,-	100	93,36	Terlaksananya penyusunan Ranperda Pajak	Ranperda Pajak
27.	Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB Rp. 155.289.250,-	100	93,46	Terlaksananya koordinasi peningkatan penerimaan pajak, retribusi dan PBB	Peningkatan koordinasi antar bidang/instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, retribusi dan PBB
28.	Asistensi Pengalihan BPHTB Rp. 8.936.700,-	100	84,26	Terlaksananya asistensi pengalihan BPHTB	Pengalihan BPHTB berjalan dengan baik dan lancar sesuai aturan
29.	Pengembangan SIPKD (DPIPD) Rp. 1.000.000.000,-	100	73,87	Terlaksananya pengembangan SIPKD	Peningkatan sarana prasarana SIPKD

C. HASIL YANG DICAPAI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2009/ 2010

No.	Jenis Kegiatan	Perkembangan Dalam Jumlah			
		2009		2010	
1	Perkembangan jumlah sosialisasi, pelatihan/bimtek mengenai keuangan dan pendapatan	56		44	
2	Perkembangan jumlah target realisasi PAD	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	▪ Pajak Daerah	84,834,491,366	71,666,752,249	75,854,256,630	77,639,340,556
	▪ Retribusi Daerah	801,214,318	645,399,806	693,826,523	851,969,221
	▪ Lain-Lain PAD Yang Sah	13,117,839,046.00	12,966,256,623.76	75,000,000	126,801,030
3	Perkembangan jumlah penertiban reklame/iklan	237		350	

D. PRESTASI KERJA TAHUN 2010

- a. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemko Padang Tahun 2009
- b. Pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah Rp. 77.639.340.556 atau 102,35% dari target yang ditetapkan.
- c. Pencapaian realisasi penerimaan PBB Rp.21.937.245.030 atau 100,68 % dari target yang ditetapkan.
- d. APBD Tahun 2011 dapat ditetapkan tahun 2010
- e. Telah disusun dan sudah dibahas di DPRD 5 (lima) Ranperda yang diprakarsai oleh DPKA yakni Ranperda Pajak BPHTB, Pajak Air Tanah, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Tambahan Penyertaan Modal kepada PDAM dan sampai akhir Desember 2010 telah disepakati 3 (tiga) Ranperda oleh DPRD yakni Perda Pajak BPHTB, Perda Pajak Air Tanah dan Perda Pajak Restoran.

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI TAHUN 2010

Permasalahan

Sekaitan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terjadi pelimpahan kewenangan pajak pusat dan provinsi menjadi pajak daerah. Dalam rangka pelimpahan wewenang tersebut perlu persiapan daerah khususnya DPKA, yakni :

- i. Dari segi aturan semua Perda Pajak dan Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tersebut.
- ii. Perlu disusun Perda baru sekaitan dengan pelimpahan wewenang pajak pusat menjadi pajak daerah seperti Perda PBB, BPHTB dan Air tanah
- iii. Perlu persiapan sarana dan prasarana serta Iptek
- iv. Perlu penyusuaian Tupoksi dan Struktur Organisasi
- v. Peningkatan SDM aparatur

Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah :

1. Telah dilaksanakan penyusunan 4 (empat) Ranperda Pajak yakni Ranperda BPHTB, Pajak Air Tanah, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan telah dibahas dengan DPRD. Dari 4 (empat) Ranperda tersebut sudah disepakati 3 (tiga) Perda yakni Perda BPHTB, Perda Pajak Air Tanah dan Perda Pajak Restorant.
2. Menyarankan penyesuaian Tupoksi melalui revisi SOTK ke Pimpinan melalui Bagian Organisasi Setda Kota Padang.
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan KPP Pratama dalam alih Iptek, serta pelatihan untuk peningkatan SDM
4. Dalam rangka meningkatkan SDM aparatur telah dilakukan sosialisasi, magang dan bimtek bekerja sama dengan Instansi terkait.

5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan BPHTB dan Air Tanah sebagai pajak daerah.
6. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendukung kegiatan di DPKA.



DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

A. VISI DAN MISI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Visi

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah”.

Misi

- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, dan aset melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya aparatur
- Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dengan stake holders dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBD.
- Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang profesional dan berkelanjutan.
- Mewujudkan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan.

B. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009

1. Program Kegiatan

a. Belanja Tidak langsung

No	Kegiatan	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik (%)	Keuangan (%)		
1	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS Rp. 26.712.947.436,45	100	90	Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS dapat dibayar
2	Belanja Hibah Rp. 37.390.950.000,-	100	88,31	Tersedianya dana untuk belanja hibah	Terbayarnya belanja hibah untuk tahun 2010
3	Belanja Bantuan Sosial Rp. 14.457.500.000,-	100	92,29	Tersedianya dana untuk bantuan sosial	Terbayarnya bantuan hibah untuk tahun 2010
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 45.173.820.350,-	100	75,10	Tersedianya dana untuk bantuan keuangan	Terbayarnya bantuan keuangan untuk tahun 2010
5	Belanja Tidak Terduga Rp. 147.712.275,00	100	47,47	Tersedianya dana untuk belanja tidak terduga	Terbayarnya belanja tak terduga untuk tahun 2010

b. Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik (%)	Keuangan (%)		
1	Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 7.500.000,-	100	45,37	Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun (240 surat, 840 surat berharga)	Terlaksananya pengiriman surat menyurat administrasi perkantoran

2	Penyediaan jasa telekomunikasi, listrik dan sumber daya air Rp. 15.600.200,-	100	40,40	Jumlah komunikasi yang terlaksana (1 Paket)	Terlaksananya komunikasi dengan stake holder
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 40.600.000,-	100	81,28	Tersedianya gudang arsip DPKA (1 Paket)	Terlaksananya penyediaan gedung untuk gudang arsip kantor
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 11.375.000,-	100	67,45	Jumlah kendaraan yang dibayarkan perizinannya (102 Unit)	Terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan dinas pengelolaan keuangan dan aset
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 10.250.000,-	100	100	Terpenuhinya alat kebersihan kantor (1 Paket)	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan kantor
6	Penyediaan alat tulis kantor Rp. 199.398.500,-	100	94,97	Tersedianya alat tulis kantor (1 Paket)	Terlaksananya pembelian alat tulis kantor
7	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan Rp. 396.696.025,-	100	60,06	Tersedianya karcis dan barang cetakan yang dibutuhkan dinas penghasil (1 Paket)	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan karcis dinas penghasil
8	Penyediaan komponen Instalasi listrik / Penerangan Bagian Kantor Rp. 10.000.000,-	100	98,95	Tersedianya alat listrik keperluan kantor (1 Paket)	Tersedianya alat listrik yang layak pakai
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 294.624.840,-	85	38,88	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (1 Paket)	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
10	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 25.960.000,-	100	68	Jumlah buku yang dapat dipenuhi (1 Paket)	Tersedianya buku perundang-undangan
11	Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 82.720.000,-	100	79,21	Tersedianya makanan dan minuman (1 Paket)	Terlaksananya makanan dan minuman
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 373.150.000,-	100	55,40	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat di KotaPadang (1 Paket)	Tercapainya pelayanan kepada masyarakat
13	Peningkatan jasa pelayanan publik Rp. 669.409.600,-	100	73,05	Terlaksananya pembayaran gaji pegawai honor (25 Orang)	Terbantunya pelaksanaan tugas kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik (%)	Kuangan (%)		
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 490.810.000,-	100	97,30	Terlaksananya Pemungutan Pajak/Retribusi dan Koordinasi (1 paket)	Tercapainya prosentase penerimaan dan koordinasi tugas SKPD (25%)
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 14.502.000,-	100	54,65	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (1 paket)	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 27.869.000,-	100	84,38	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (1 paket)	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
4	Rehabilitasi sedang/berat ruangan gedung kantor Rp. 354.120.000,-	100	78,54	Terlaksananya rehab gedung kantor (1 paket)	Tersedianya ruang gedung kantor yang representatif
5	Pengadaan sarana dan prasarana akibat bencana Rp. 101.225.000,-	100	72,91	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Terlaksananya kegiatan perkantoran dengan lancar

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Kegiatan	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik (%)	Kuangan (%)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Rp. 33.175.000,-	100	96,07	Jumlah pakaian dinas yang tersedia (192 Paket)	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Kegiatan	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik (%)	Kuangan (%)		
1	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD tahun 2010 Rp. 176.500.750,-	90	44,84	tersedianya buku perda APBD 2010 dan buku nota keuangan (250 buku)	terlaksananya Perda tentang APBD 2010
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2010 Rp. 71.178.000,-	90	15,70	jumlah buku perwako APBD 2010 (200 buku)	telaksannya pembuatan rincian APBD 2010

3	Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2009 Rp. 161.845.000,-	100	91,30	Buku Perda APBD 2009 dan nota keuangan 2009 (250 buku)	terlaksananya perda tentang APBD 2009
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2009 Rp. 75.053.000,-	100	75,02	tersedianya buku perwako APBD 2009 (200 buku)	terlaksananya rincian APBD 2009
5	Penyusunan Ranperda dan Ranperwako APBD 2009 Rp. 158.449.000,-	100	94,27	Tersedianya buku Perda - APBD 2009 dan buku nota keuangan (550 buku)	Terlaksananya Perda tentang APBD 2009
6	Pengendalian dan Penyusunan DPA SKPD Rp. 140.415.000,-	100	63,92	Terlaksananya pembahasan buku DPA SKPD (1 paket)	Tersedianya DPA SKPD sesuai dengan kebutuhan Program kegiatan (20 %)
7	Evaluasi Standar Analisa Biaya Rp. 22.854.500,-	100	87,70	tersedianya buku standar biaya (1 Paket)	tercapainya aturan tentang standar biaya (20 %)
8	Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 744.578.745,-	100	59,08	Terlaksana pemungutan PBB dan BPHTB (1 Paket)	tercapainya Pemungutan PBB dan BPHTB di Kota Padang
9	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang Rp. 123.812.000,-	100	31,37	Terlaksananya penertiban reklame	-
10	Pembuatan Banner tempat pemasangan reklame Rp. 76.633.000,-	100	99,64	Tersedianya tempat pemasangan Banner (1 Paket)	Tersedianya Media informasi pada masyarakat (20%)
11	Perubahan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah Rp. 42.468.000,-	-	-	Ranperda, perubahan pajak dan retribusi daerah	Terwujudnya pengelolaan pajak, retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12	Pendataan potensi pajak dan retribusi Rp. 121.715.000,-	100	94,03	Terdatanya potensi pajak dan retribusi	Tertib administrasi pajak dan retribusi
13	Sosialisasi dalam rangka pembekalan kolektor PBB Rp. 210.550.000,-	-	-	Terealisasi nya penerimaan PBB (225 Orang)	Tercapainya target PBB tepat waktu
14	Percepatan pencapaian target penerimaan PBB Rp. 989.450.000,-	-	-	terlaksananya Sosialisasi PBB pada kolektor (225 Orang)	tersosialisasikannya PBB pada kolektor
15	Penghapusan Aset Rp. 77.340.000,-	94,29	73,23	terlaksananya penghapusan dan nilai aset (1 Paket)	Tersedianya data barang aset daerah

16	Penilaian Aset/Validasi Data Aset Rp. 61.198.500,-	100	90,48	Tersedianya data pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemko Padang	Terdatanya tanah dan bangunan Pemko
17	Penatausahaan Keuangan Rp. 143.352.500,-	100	99,30	Terlaksanya Penata usahaan keuangan (1 Paket)	tercapainya tertib administrasi pengelola keuangan (20 %)
18	Rekonsiliasi data penerimaan dan belanja SKPD Rp. 52.829.000,-	100	96,75	Terlaksanya berita acara rekonsiliasi	Tersedianya rekonsiliasi data antara BUD dengan Bank Nagari dan SKPD
19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Rp. 151.650.000,-	100	90,07	Terlaksannya pemungutan pajak daerah Kota Padang (1 Paket)	Tercapainya pemungutan pajak daerah Kota Padang
20	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Rp. 51.191.000,-	100	68,03	Terlaksanya sosialisasi pada masyarakat (1 paket)	Tersosialisasi nya pajak dan retribusi pada masyarakat
21	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2008 Rp. 75.003.300,-	100	93,56	buku Perwako penjabaran pertanggung jawaban APBD 2008 (1Paket)	Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2008
22	Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2008 Rp. 138.251.500,-	100	98,27	buku perda pertanggung jawaban APBD 2008 (1 paket)	Tersedianya rincian Perda pertanggung jawaban APBD 2008
23	Asistensi Pengelolaan Keuangan Rp. 110.011.600,-	100	92,36	terlaksanya BinteK/Sosialisasi/ Pelatihan (1 paket)	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SKPD mengelola keuangan Daerah
24	Pembinaan Administrasi Keuangan Rp. 72.257.000,-	100	79,93	Tertib administrasi keuangan (1 Paket)	Terciptanya tertib administrasi keuangan daerah (20 %)
25	SIPKD/SIKD Rp. 145.207.000,-	100	71,97	Terlaksannya kegiatan SIPKD / SIKD (1 Paket)	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SKPD mengelola keuangan Daerah (20 %)
26	Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang Rp. 20.313.925,-	60	17,32	Rapat Kordinasi dan penyelesaian tindak lanjut TPTGR (100 %)	Terselesaikannya kerugian barang dan uang di Lingkungan Pemko Padang

27	Sosialisasi kebijakan Akuntansi Rp. 62.497.500,-	100	88,42	Terlaksannnya Sosialisasi kebijakan Akuntansi (1 Paket)	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SKPD tentang kebijakan akuntansi (20 %)
----	---	-----	-------	---	--

Alasan tidak tercapainya beberapa kegiatan 100% sebagai berikut :

1. Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang

Alasannya : Penyampaian data dari Inspektorat untuk ditindaklanjuti belum lengkap

2. Kegiatan Sosialisasi dalam rangka pembekalan kolektor PBB dan kegiatan percepatan pencapaian target penerimaan PBB merupakan kegiatan yang sumber dananya merupakan insentif dari pencapaian target PBB Tahun 2008 lebih dari 100% yang kemudian 2 kegiatan tersebut dimasukkan pada anggaran perubahan kedua sehingga rentang waktu pelaksanaan kegiatan terlalu dekat dengan waktu berakhirnya anggaran (Desember 2009).

2. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2008/2009

No.	Jenis Kegiatan	Perkembangan dalam Jumlah			
		2008		2009	
1.	Perkembangan Jumlah Sosialisasi, Pelatihan/Bimtek Mengenai Keuangan dan Pendapatan	23		56	
2.	Perkembangan Jumlah Target Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	- PAD	128.469.134.954	117.728.886.788	133.164.556.383	119.264.933.329
	- Retribusi Daerah	30.916.695.824	24.793.292.954	28.124.113.573	21.992.680.948
3.	Perkembangan Jumlah Penertiban Reklame/Iklan	208		237	

3. Prestasi Kerja Tahun 2009 (Tingkat Propinsi dan Nasional)

- a. Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2008
- b. Piagam penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai daerah Berprestasi berdasarkan Kinerja Keuangan, Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI TAHUN 2009

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dari target yang ditetapkan disebabkan terjadinya gempa bumi tanggal 30 September 2009, karena banyak potensi penerimaan daerah yang hilang. Solusi yang dilakukan adalah dengan tetap memaksimalkan penagihan potensi penerimaan yang tidak kena dampak gempa.
2. Belum jelasnya pembagian tugas dan fungsi antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Bagian Perlengkapan dalam pengelolaan aset daerah untuk itu perlu peninjauan kembali Perwako tentang uraian tugas Bidang Aset dan Bagian Perlengkapan yang disesuaikan dengan Perda No. 10 tahun 2009.

3. Banyaknya aset Pemko yang rusak karena gempa sehingga perlu pendataan ulang dan validasi data asset yang membutuhkan tenaga dan waktu serta dukungan dari semua SKPD terkait.
4. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan pengelolaan aset sehingga kegiatan pengelolaan aset belum dilaksanakan secara maksimal.



D. Upaya Yang dilakukan

1) Penanggulangan Masalah Internal

- Memberikan pelatihan dan pendidikan teknis kepada seluruh pegawai Bawasda baik melalui PKS yang dilaksanakan tiap tahunnya dan memberikan kesempatan pendidikan teknis fungsional.
- Penyediaan sarana pembelanjaan melalui peningkatan jumlah buku perpustakaan.
- Memberikan pembinaan internal atau pengarahan oleh Kepala Bawasda kepada seluruh staf baik pada apel pagi maupun rapat staf Bawasda.
- Memperbaiki sarana transportasi yang kurang layak serta upaya memaksimalkan operasional kendaraan.

2) Penanggulangan Masalah Eksternal

- Melaksanakan sosialisasi tentang fungsi pengawasan pada setiap rapat koordinasi pengawasan dan setiap sosialisasi pengawasan yang narasumbernya dari Bawasda.
- Memberikan keyakinan kepada unit kerja tentang arti penting pengawasan melalui percepatan tindak lanjut.

3.1.12.6. Dinas Pendapatan Daerah

A. Belanja Tidak Langsung

No	Kegiatan & Jumlah Dana	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik %	Keu %		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai / Personalia dana sebesar Rp.9.005.855.235,- Realisasi Rp 8.673.105.953,-	100	96,31	terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai.	kinerja Dinas Pendapatan meningkat.

B. Belanja Langsung

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan & Jumlah Dana	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik %	Keu %		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dana sebesar Rp.3.950.000,- Realisasi Rp 1.887.800,-	100	47,67	tersedianya jasa surat menyurat administrasi kantor.	terlaksananya pengiriman surat menyurat administrasi kantor.
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dana sebesar Rp.12.240.000,- Realisasi Rp 9.269.781,-	100	75,73	terlaksananya komunikasi dengan wajib pajak dan meningkatnya sarana pelayanan administrasi perkantoran.	terlaksananya komunikasi dengan 170.702 Wajib Pajak.
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dana sebesar Rp.7.500.000,- Realisasi Rp 7.000.000,-	100	93,33	tersedianya gedung arsip pada Dinas Pendapatan.	terlaksananya penyewaan gedung arsip kantor.
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor dana sebesar Rp.57.809.300,- Realisasi Rp 57.787.100,-	100	99,96	terlaksananya pembelian alat kantor.	terciptanya fasilitas kerja yang lebih baik.
5	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan dana sebesar Rp.676.001.375,- Realisasi Rp 494.825.425,-	100	73,20	tersedianya karcis dan barang cetakan yang dibutuhkan Dinas-dinas Penghasil Daerah.	terlaksananya penyediaan barang cetakan dan karcis Dinas penghasil.
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Sebesar Rp.3.500.000,- Realisasi Rp 3.500.000,-	100	100	tersedianya alat listrik keperluan kantor.	tersedianya alat listrik yang layak pakai.

7	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Dana Sebesar Rp.56.619.300,- Realisasi Rp 52.075.000,-	100	91.97	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.	terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Masukan : Dana Sebesar Rp.14.824.000,- Realisasi Rp 14.746.300,-	100	99.48	tersedianya beberapa buku bacaan dan media surat kabar.	meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PNS tentang Peraturan Perundang-undangan.
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman Dana Sebesar Rp.19.500.000,- Realisasi Rp 17.782.396,-	100	91.19	Tersedianya makanan dan minuman pegawai.	Tersedianya makanan dan minuman.
10	Penyediaan Peralatan Kebersihan Dana Sebesar Rp.4.100.000,-	100	100	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor.	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan kantor.
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Dana Sebesar Rp.835.160.000,- Realisasi Rp 773.623.400,-	100	92.63	terbayarkannya gaji pegawai honor/tidak tetap.	Terlaksananya FUI-OKSI Dinas Pendapatan.
12	Penyediaan Database Dana Sebesar Rp.10.000.000,- Realisasi Rp 10.000.000,-	100	100	Tersedianya data wajib pajak yang akurat.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
13	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Gaji Dana Sebesar Rp.20.000.000,- Realisasi Rp 19.900.000,-	100	99,50	Tersedianya hardware dan software dalam pengelolaan gaji.	Meningkatnya keakuratan pembayaran gaji PNS.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan & Jumlah Dana	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik %	Keu %		
1	2	3	4	5	6
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dana Sebesar Rp.135.000.000,- Realisasi Rp 129.745.000,-	100	96.11	Terlaksananya pengadaan kendaraan sepeda motor.	Meningkatnya kelancaran mobilitas aparatur.
15	Pengadaan Mebeluer Dana Sebesar Rp.8.850.000,- Realisasi Rp 8.690.000,-	100	98.19	Terlaksananya pengadaan mebeluer.	Meningkatnya kelancaran kerja aparatur.
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dana Sebesar Rp.419.734.000,- Realisasi Rp 391.038.895,-	100	93.16	Terlaksananya pemungutan Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak.	Meningkatnya Perkiraan Pendapatan Daerah.
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dana Sebesar Rp.12.100.000,- Realisasi Rp 8.417.926,-	100	69.57	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dana Sebesar Rp.18.925.000,- Realisasi Rp 6.556.000,-	100	34.64	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor.	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Kegiatan & Jumlah Dana	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fisik %	Keu %		
1	2	3	4	5	6
19	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dana sebesar Rp.23.550.000,- Realisasi Rp 21.867.000,-	100	92.85	Tersediannya pakaian dinas	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas.

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Kegiatan & Jumlah Dana	Realisasi		Keluaran	Hasil
		Fiskal %	Keu %		
1	2	3	4	5	6
20	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Sebesar Rp.128.130.700,- Realisasi Rp 99.710.000,-	100	77.82	Tertindakannya sosialisasi kepada masyarakat dan Wajib Pajak di Kota Padang.	Meningkatnya pemahaman wajib pajak tentang paket regulasi.
21	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dana Sebesar Rp.1.859.400.093,- Realisasi Rp 1.406.879.517,-	100	75.66	Tertindakannya pemungutan Pajak Daerah di Kota Padang.	Terticipainya pemungutan Pajak dan Retribusi daerah di Kota Padang.
22	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Bagi Hasil Pajak dana sebesar Rp.1.876.275.600,- Realisasi Rp 1.704.064.411,-	100	90.82	Tertindakannya pemungutan PBB dan PBHTB di Kota Padang.	Terticipainya pemungutan PBB dan PBHTB di Kota Padang.
23	Verifikasi/pemeliharaan dan Sismiop PBB dan penyelesaian masalah keberatan Pengurangan PBB dana sebesar Rp.200.000.000,- Realisasi Rp 200.000.000,-	100	100	Tertindakannya verifikasi pendataan Wajib Pajak.	Meningkatnya potensi data Wajib Pajak PBB.
24	Pembuatan Peta Titik Lokasi Reklame dana sebesar Rp.90.000.000,- Realisasi Rp 88.540.600,-	100	98.38	Tertindakannya pembuatan peta titik lokasi reklame.	Terticipainya pembuatan peta titik lokasi reklame.
25	Pendataan Ulang Pajak Reklame dana sebesar Rp.50.000.000,- Realisasi Rp 48.616.200,-	100	97.23	Tertidainya data pajak reklame yang akurat.	Tertindakannya pendataan Pajak Reklame.
26	Kajian On-Line Pajak Hotel dan Pajak Restoran dana sebesar Rp.90.000.000,- Realisasi Rp 85.903.800,-	100	94.86	Tertindakannya pelayanan kepada masyarakat di Kota Padang.	Tertindakannya kajian Pajak Hotel dan pajak Restoran.
27	Sistem Informasi Reklame Manajemen Berbasis Digital dana sebesar Rp.87.073.000,- Realisasi Rp 85.279.250,-	100	97.94	Tertindakannya sistem informasi reklame berbasis digital.	Prosentase terticipainya penerimaan Pajak Reklame.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas

- 1) Kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih rendah untuk membayar Pajak/Retribusinya.
- 2) Khusus untuk pajak Hotel untuk lebih mengefektifkan penagihan tunggakan.
- 3) Sebagai koordinator pemungutan PAD dalam hal penetapan target penerimaan retribusi daerah terkendala karena sebagian besar unit kerja penghasil tidak mempunyai data potensi yang terinventarisasi.

D. Upaya Yang Dilakukan.

- 1) Peningkatan penagihan tunggakan secara intensif, dan meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang Perda Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dilingkungan Dinas Pendapatan Kota Padang.
- 3) Dinas Pendapatan telah beberapa kali mengirimkan sebagian data potensi ke Unit kerja
- 4) Menempatkan petugas dimasing-masing hotel dalam upaya pengawasan.

DAFTAR HADIR PEGAWAI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

HARI :
TANGGAL :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	ABSEN PAGI		ABSEN SORE		KET
					PUKUL	TANDA TANGAN	PUKUL	TANDA TANGAN	
	BIDANG PENDAPATAN								
1	BUDI PAYAN,SE	19720614 200212 1 004	III/c	Kepala Bidang Pendapatan		1		1	
2	SARAMAN, S.Kom	19670615 199703 1 006	III/d	Kasi Retri.& Pendapatan lain-lain		2		2	
3	RIVZALIUS, SE	19600102 198903 1 006	III/d	Kasi Pajak		3		3	
4	DELFITRIYANTI, SE	19710823 199303 2 006	III/c	Kasi Pendataan & Penetapan		4		4	
5	SALMAN, S.Sos, M.Si	19680412 199202 1 00	III/d	Staf		5		5	
6	YUHELMAN, R,Bac	19590710 198603 1 007	III/c	Staf		6		6	
7	YENITA, S.Sos	19640110 198603 2 007	III/c	Staf		7		7	
8	TAHARUDDIN	19580926 198302 1 001	III/b	Staf		8		8	
9	IRZANI YULMA	19620424 198408 2 001	III/b	Staf		9		9	
10	WENNI MURNINGSIH	19601109 198101 2 002	III/b	Staf		10		10	
11	INDRYA NINA	19550721 198403 2 002	III/b	Staf		11		11	
12	GUSNIDAR	1957817 198503 2 004	III/b	Staf		12		12	
13	AZIZUL, A	19561112 198502 1 002	III/b	Staf		13		13	
14	TUTI YUNINGSIH	19610616 198110 2 001	III/b	Staf		14		14	
15	IDRUS	19620805 198503 1 006	III/b	Staf		15		15	
16	HERMALITA HAKIM, SE	19730307 199303 2 003	III/b	Staf		16		16	
17	ANDRI DIAN PUTRA	19660131 199003 1 002	III/a	Staf		17		17	
18	ROZALINDA	19620601 199112 2 001	III/a	Staf		18		18	
19	NILSON, SE	19660107 200701 1 002	III/a	Staf		19		19	
20	MAISAL, SE	19720516 201001 1 003	III/a	Staf		20		20	
21	BUDI KURNIAWAN, ST	19860513 201001 1 005	III/a	Staf		21		21	
22	HENDRA ANWAR, S.S	19720603 201001 1 003	III/a	Staf		22		22	
23	RIO YUDHA GAMA, Amd	19780701 200312 1 006	II/d	Staf		23		23	
24	MILTA RESDIAL	19620107 200701 2 001	II/d	Staf		24		24	

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	ABSEN PAGI		ABSEN SORE		KET
					PUKUL	TANDA TANGAN	PUKUL	TANDA TANGAN	
26	SRI AROMA SAKTI, Amd	19791108 201001 2 006	II/c	Staf		26		26	
27	SRI DES YESSI	19601224 200604 2 002	II/b	Staf	27		27		
28	HALENA	19601009 200604 2 001	II/b	Staf		28		28	
29	YUSMAN HENDRI	19631121 200701 1 003	II/b	Staf	29		29		
30	NURSALMA	19640123 200701 2 001	II/b	Staf		30		30	
31	DAMRIL	19620623 200701 1 004	II/b	Staf	31		31		
32	NASRUL	19700305 200801 1 002	II/a	Staf		32		32	
33	M. FARHAN, MS	19840922 200901 1 001	II/a	Staf	33		33		
34	AUDIA TRESIA	19820812 201001 2 006	II/a	Staf		34		34	
35	DARFISMAN	19621217 200701 1 002	II/a	Staf	35		35		
36	ARIF SYAHPUTRA			Staf		36		36	
37	RACHDIAL ELFANA			Staf					
38	BUDI P. SETIAWAN, SE			Staf	37		37		
39	LILI ANGGRAINI			Staf		38		38	

KETERANGAN :

JUMLAH : _____ Orang
 HADIR : _____ Orang
 KURANG : _____ Orang

TIDAK HADIR :

1. _____
 2. _____
 3. _____, dst

Padang, 2011
 KEPALA DPKA KOTA PADANG
 KA. BIDANG PENDAPATAN

BUDI PAYAN, SE
 Nip.19720614 200212 1 004

DAFTAR HADIR PEGAWAI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

HARI :
TANGGAL :

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	ABSEN PAGI		ABSEN SORE		KET
					PUKUL	TANDA TANGAN	PUKUL	TANDA TANGAN	
	BIDANG PENDAPATAN (KOWILJA)								
1	Adnan,S.Sos	19551126 198003 1 003	III/d	Staf		1		1	
2	Mawardas,SH	19640308 199503 1 002	III/b	Staf		2		2	
3	Mulyanto, SE	19661007 199308 1 001	III/b	Staf		3		3	
4	Ayun Sabran	19600920 198503 1 005	III/b	Staf		4		4	
5	Deswardi	19571228 198812 1 001	III/b	Staf		5		5	
6	Darwen	19611225 198206 1 001	III/b	Staf		6		6	
7	Suhatri	19600714 198503 1 010	III/b	Staf		7		7	
8	Yosefrizal	19621031 198811 1 001	III/b	Staf		8		8	
9	Alkamar	19600903 199103 1 002	III/b	Staf		9		9	
10	Jambur Sitepu, SE	19660810 200901 1 003	III/a	Staf		10		10	
11	Suarnijon Imra, SE	19640717 200701 1 003	II/a	Staf		11		11	
12	Yendris	19650505 199503 1 004	II/d	Staf		12		12	
13	Ramadhanus	19630515 200701 1 006	II/a	Staf		13		13	
14	Marsyelsyam	19620301 200701 1 002	II/a	Staf		14		14	
15	Jonirson	19650626 200701 1 003	II/a	Staf		15		15	

KETERANGAN :

JUMLAH : _____ Orang
HADIR : _____ Orang
KURANG : _____ Orang

TIDAK HADIR :

1. _____
2. _____
3. _____, dst

Padang, 2011
An. KEPALA DPKA KOTA PADANG
KA. BIDANG PENDAPATAN

BUDI PAYAN, SE

DASAR PERHITUNGAN RENCANA TARGET

UNTUK TAHUN 2011.-

/ 2010 dihitung bulan

REKLAME SEBESAR RP. 3.250.000.000,-

POTENSI REKLAME PERMANEN (DARI TAHUN 2010) :

Realisasi Penerimaan Reklame s/d Bulan Oktober 2010 :

Reklame Papan	: 746 SKP	Rp 1.661.220.000	2 315 300.000
Reklame Papan Merek	: 467 SKP	Rp 117.432.000	133.714.750
Reklame Bersinar	: 901 SKP	Rp 535.601.500	665.164.135
Reklame Kendaraan	: 71 SKP	Rp 44.748.000	53.166.000
JUMLAH	: 2185 SKP	(Terlampir)	Rp 2.359.001.500
POTENSI REKLAME TAHUN 2009 YANG BELUM TERTAGIH (NOP-DES)			Rp 497.859.000
Potensi Kotor untuk tahun 2011			Rp 2.856.860.500

KEMUNGKINAN KEADAAN PADA TAHUN 2011 :

1. Kemungkinan Potensi tidak tertagih pada tahun 2010 (tidak memperpanjang izin) = 10 %	Rp 285.686.050	-	990.938
POTENSI BERSIH REKLAME PERMANEN :	Rp 2.571.174.450		2 095.898 77
2. Kemungkinan Pemasangan Reklame Permanen Baru 15 %	Rp 428.529.075		
3. Kemungkinan Penerimaan dari Reklame :			2 3 364.600
a Kain	Rp 250.000.000	750.000.000	
b Selebaran	Rp 2.000.000	Rp 252.000.000	
RENCANA PENERIMAAN TAHUN 2011		Rp 680.529.075	+
RENCANA TARGET TAHUN 2011		Rp 3.251.703.525	
		Rp 3.250.000.000	
			9 000.000.

SEWA TANAH SEBESAR RP. 600.000.000,-

POTENSI RET.SEWA TANAH DARI TAHUN 2010

Relisasi Ret.Sewa Tanah s/d Oktober 2010

POTENSI TAHUN 2009 YANG BELUM TERPUNGUT (NOP-DES)

Potensi Kotor untuk tahun 2011

KEMUNGKINAN KEADAAN TAHUN 2011

1. Kemungkinan tidak tertagih 14 %	Rp 89.308.662	-	
POTENSI BERSIH RET. SEWA TANAH TAHUN 2011	Rp 548.610.349		
2. Kemungkinan pemasangan baru 9%	Rp 49.374.931	+	
RENCANA PENERIMAAN RET.SEWA TAHANH TAHUN 2011	Rp 597.985.281		
RENCANA TARGET RET.SEWA TANAH TAHUN 2011	Rp 600.000.000		

UANG JAMINAN REKLAME SEBESAR Rp. 110.000.000,-

Terpungut s/d Oktober 2010 = 107,576,000,-

Rp 110.000.000

Padang, 29 Oktober 2010

KABID. PENDAPATAN

BUDI PAYAN, SE

Nlp.19720614.200212.1.004

**DASAR PERHITUNGAN RENCANA TARGET
UNTUK TAHUN 2012.-**

I. REKLAME SEBESAR RP. 4.031.250.000.-

A. POTENSI REKLAME PERMANEN (DARI TAHUN 2011) :

Realisasi Penerimaan Reklame s/d Bulan Juni 2011 :

Reklame Papan	:	498 SKP	Rp 1.143.310.000
Reklame Papan Merek	:	330 SKP	Rp 80.959.500
Reklame Bersinar	:	680 SKP	Rp 359.205.000
Reklame Kendaraan	:	51 SKP	Rp 41.646.000 +
J U M L A H	:	1559 SKP	(Terlampir) Rp 1.625.120.500

B. <u>POTENSI REKLAME DR TAHUN 2010 YANG BELUM TERTAGIH (JUL-DES)Th 2011 :</u>	Rp 1.382.243.500
Potensi Kotor untuk tahun 2012	Rp 3.007.364.000

C KEMUNGKINAN KEADAAN PADA TAHUN 2012 :

1. Kemungkinan Potensi tidak tertagih (tidak memperpanjang izin)= 25%	Rp 751.841.000 -
POTENSI BERSIH REKLAME PERMANEN :	Rp 2.255.523.000
2. Penyesuaian Tarif Jenis P. Merek, Bersinar ke Papan(50%) (tidak termasuk jenis Kendaraan)	Rp 1.110.775.500
3. Kemungkinan Pemasangan Reklame Permanen Baru 12 %	Rp 360.883.680
4. Kemungkinan Penerimaan dari Reklame Non Permanen :	
a Kain	Rp 302.000.000
b Selebaran	Rp 2.000.000
	Rp 304.000.000
	Rp 1.775.659.180 +
RENCANA PENERIMAAN TAHUN 2012 (sebelum kenaikan tarif)	Rp 4.031.182.180
<u>RENCANA TARGET PAJAK REKLAME TAHUN 2012</u>	<u>Rp 4.031.250.000</u>

II. SEWA TANAH SEBESAR RP. 698.750.000.-

A. POTENSI RET.SEWA TANAH DARI TAHUN 2011

Relasiasi Ret.Sewa Tanah s/d Juni 2011	Rp 367.249.029
--	----------------

B. <u>POTENSI TAHUN 2010 YANG BELUM TERPUNGUT (JUL-DES) Tahun 2011</u>	Rp 285.979.324 +
Potensi Kotor untuk tahun 2012	Rp 653.228.353

C. KEMUNGKINAN KEADAAN TAHUN 2012

1. Kemungkinan tidak tertagih 11 %	Rp 71.855.119 -
POTENSI BERSIH RET. SEWA TANAH TAHUN 2012 DARI TH.2011	Rp 581.373.234
2. Kemungkinan Penambahan 20%	Rp 116.274.647 +
RENCANA PENERIMAAN RET.SEWA TAHAN TAHUN 2012	Rp 697.647.881
<u>RENCANA TARGET RET.SEWA TANAH TAHUN 2012</u>	<u>Rp 698.750.000</u>

III. UANG JAMINAN REKLAME SEBESAR Rp. 107.500.000.-

1 Perbandingan dengan tahun 2011 :	
Terpungut s/d Juni 2011	Rp 75.442.500
2 Kemungkinan terpungut dari Jul-Des 2011	Rp 32.057.500
<u>J U M L A H</u>	<u>Rp 107.500.000</u>

Padang, 28 Juli 2011

KABID. PENDAPATAN

BUDI PAYAN, SE

Nip.19720614.200212.1.004